

**UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
KOPERASI KABUPATEN JOMBANG DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :

**AHMAD ZUHDI AMRULLOH
0210310008**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
MALANG**

2008

MOTTO

HIDUP ADALAH PERBUATAN

(SB)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
KOPERASI KABUPATEN JOMBANG DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Disusun oleh : Ahmad Zuhdi Amrulloh

NIM : 0210310008

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Malang, 25 Juli 2008

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Imam Hardjanto MAP
NIP. 130518958

Drs. Romula Adiono
NIP. 131697688

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Mahasiswa

Malang, 29 Juli 2008

Nama : Ahmad Zuhdi Amrulloh

NIM : 0210310008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang dalam Pemberdayaan Usaha Kecil.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Kedua orang tua, Bapak Maknun BA dan Ibu Umroturrosyidah dan semua keluarga atas segala doa, dorongan dan bantuannya pada penulis
2. Bapak Prof. Dr. Suhadak, MEC selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
3. Bapak Prof. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Imam Hardjanto, MAP dan Bapak Drs. Romula Adiono selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, saran dan masukan kepada penulis
5. Bapak Drs. HM. Ja'far Jazuri, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang
6. Teman- Teman FIA Publik dan Sahabat atas segala dukungan dan doanya
7. Semua Pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2008

Penulis

RINGKASAN

Ahmad Zuhdi Amrulloh, 2008. Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Dosen Pembimbing : Drs. Imam Hardjanto MAP dan Drs. Romula Adiono. 92 Hal

Krisis ekonomi telah menyadarkan bangsa ini bahwa roda perekonomian yang bertumpu pada sistem konglomerasi banyak yang ambruk. Konsep ekonomi kerakyatan menjadi solusi alternatif yang bertumpu pada potensi usaha-usaha kecil dan menengah. Usaha Kecil di Indonesia ternyata menempati porsi yang besar dalam menentukan pertumbuhan ekonomi negara dan pada kenyataannya mampu bertahan walaupun situasi perekonomian mengalami kelesuan dan mampu berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat kelas bawah.

Pada kenyataannya, keberadaan usaha kecil seringkali menimbulkan argumentasi yang kontradiktif, karena di satu sisi usaha kecil sering dianggap memiliki keunggulan dan dianggap sebagai tulang punggung perekonomian rakyat kecil namun di sisi lain usaha kecil seringkali dikaitkan dengan usaha yang dikelola oleh masyarakat dengan ketrampilan kurang memadai, teknologi yang masih tradisional.

Kabupaten Jombang memiliki bermacam-macam produk-produk unggulan yang berpotensi untuk dibangun dan dikembangkan agar mampu bersaing.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian yaitu apa saja upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil, kendala apa saja dalam pemberdayaan usaha kecil dan respon pengusaha kecil dalam pemberdayaan usaha kecil. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam memberdayakan usaha kecil.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya memberdayakan usaha kecil, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang membuat beberapa program yang menyangkut Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Bidang Teknologi, Bidang Permodalan, Bidang Pemasaran dan Bidang Administrasi Usaha.

Pemberdayaan dalam bidang SDM dengan melakukan program kegiatan diklat dan pelatihan manajemen produksi, manajemen keuangan, maupun dalam hal manajemen pemasarannya.

Pemberdayaan dalam Bidang Teknologi dengan melakukan program kegiatan Pengadaan dan pelatihan (diklat) tentang penguasaan teknologi yang berbasis pada usaha kecil, Pengadaan bimbingan dan konsultasi teknologi terhadap usaha kecil secara terpadu.

Pemberdayaan dalam Bidang Permodalan dengan melakukan program kegiatan pemberian informasi bantuan modal atau kredit dari lembaga-lembaga keuangan, baik itu bank maupun nonbank seperti koperasi. Informasi bantuan ini juga meliputi pemberian konsultasi tentang pengajuan proposal.

Pemberdayaan dalam Bidang Pemasaran dengan melakukan program Pelatihan bagi pengusaha kecil tentang *grading, branding dan packaging Product*, Pelatihan bagi pengusaha kecil bidang distribusi barang dan penjualan, Penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah, Pembentukan sistem informasi pasar antar wilayah sentra usaha kecil, Pengembangan jasa sarana transportasi dan distribusi dan Pelatihan untuk pengusaha kecil tentang prosedur dan teknik impor.

Pemberdayaan dalam Bidang Administrasi Usaha dengan melakukan program kegiatan Pelatihan bagi pengusaha kecil tentang administrasi perusahaan terapan, Pelatihan tentang manajemen keuangan terapan bagi pengusaha kecil dan Pelatihan untuk pengusaha kecil tentang pembuatan usulan pengembangan usaha

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengimplementasikan program yang ada secara tepat. Program yang disusun kurang menyentuh permasalahan dasar usaha kecil dan seringkali pelatihan yang dilakukan di lapangan bersifat formalitas belaka. Kurangnya tenaga teknis yang tersedia dan juga minimnya dana yang dimiliki merupakan alasan utama kurang maksimalnya kinerja Dinas.



Ahmad Zuhdi Amrulloh, 2008. The Effort of the Industrial official Government, Trade and economic enterprise district of Jombang In the effort on empowering Of Small Industry. Administrative Departement, University of Brawijaya, Malang. Advisor: Drs. Imam Hardjanto, MAP and Drs. Romula Adiono. 92 p.

Economic crisis makes this nation realize that economic wheel based on the collapse of conglomeration system. The social economic concept becomes alternative solution which based on the potency of small and medium industries. In fact, the small industry in indonesia has big porsion in deciding state economic growth and in the reality can resist although economical situation undergo pathetic situation as support of low social economic.

In fact, the existance of small industries often raise contradictive argumentation, because in one side small industry has superiority as backbone of low social economic. Thus, in other side, small industry is often connected with industry which is managed by society with inadequate skills, traditional technology.

Jombang district has superiority kinds of product which has potency to be built and developed so they can compete.

This study uses qualitative research methodology with descriptive approach, which is focused on the efforts of Industrial official Government, Trade and economic enterprise of Jombang district In the effort on empowering Of small industry, the obstacles in empowering Of small industry and the response of small entrepreneur. Otherwise, the target is to know how on the efforts of Industrial official Government, Trade and economic enterprise In the effort on empowering Of Small Industry.

The result of this study shows that In the effort on empowering Of Small Industry Industrial official Government, Trade and economic enterprise of Jombang district make some programs connected with human resource, technology field, capitalization, marketing and industrial administration.

Empowering human resources by devoloping training edukation programe of production management, financial management, and in marketing management.

Empowering in tecnology field by doing activity supplying programe and training education about tecnolgy mastery which base on small industries, supplying guidance and tecnology consultation toward integreted small industries.

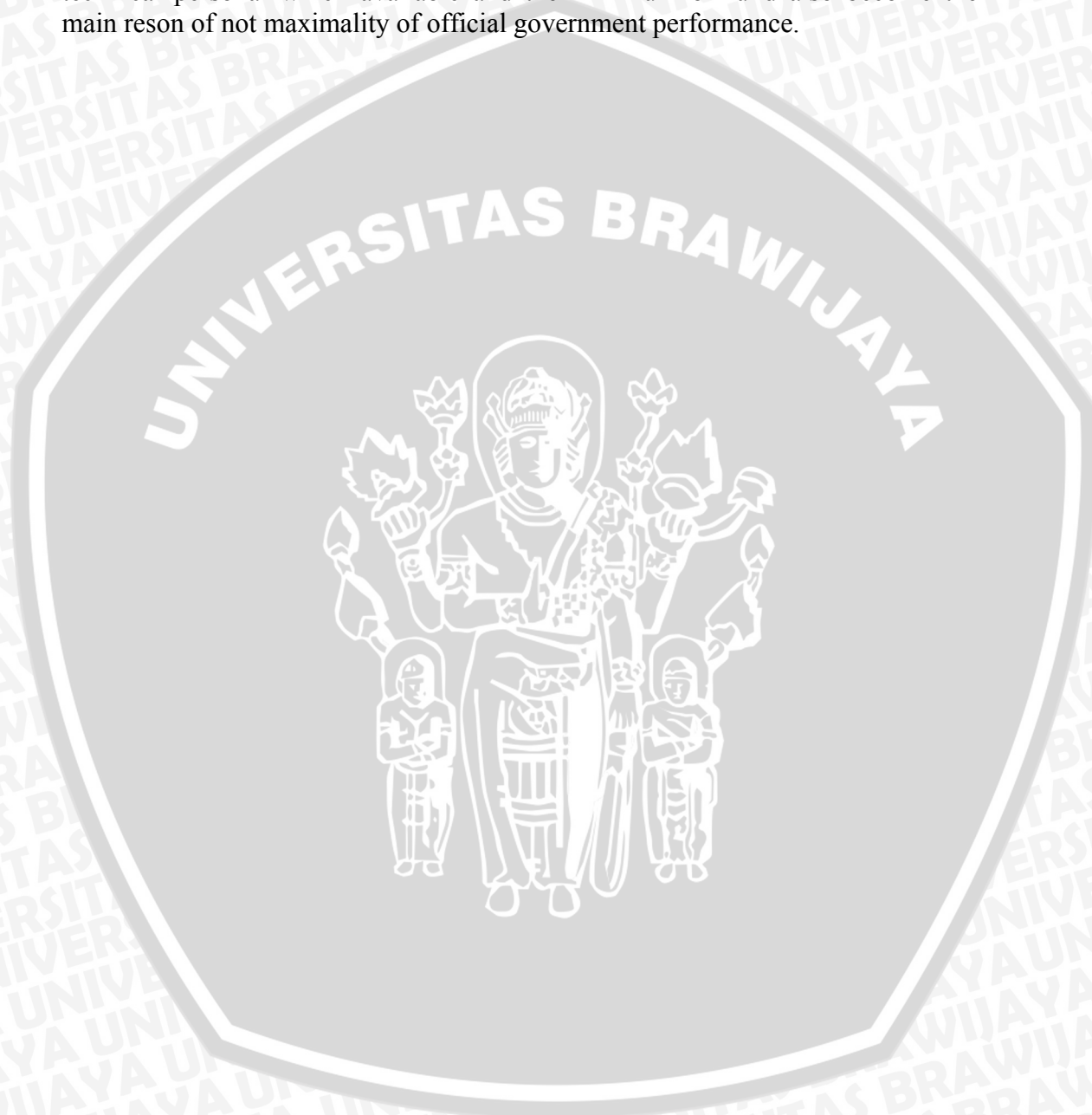
Empowering in capitalization by doing activity programe in information in capital assistance or credit from financial intuition, through bank or non bank intuition such as interprize. This information assistance cover giving consultation about propose proposal .

Empowering marketing by doing training programe for small intrepreneur about *grading, branding dan packaging Product*, Training for small entrepreneur in goods distribution field and sales, administrating fair for superior local product, forming information sistem of market amoung area in small industries central, developing facilities service of transportation and training for small entrepreneur about procedural and tecnical of importing.

Empowering and administration industries field by doing training program for small entrepreneur about applied company administration, traning about

financial management for small entrepreneur and training for small entrepreneur about the making of proposal in industrial development.

The other side, the result of the study also shows that Industrial Official Government, Trade and economic enterprise implement program precisely. Programs that has organise do not touch the basic problem of small industry and often the training which has been done in the field only formality. Inadequacy of technical personal which available and the minimum of fund also become the main reason of not maximality of official government performance.



Pedoman Wawancara

• Kepada Disperindagkop

1. Bagaimana gambaran perkembangan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang ?
2. Sejauh mana keterlibatan Disperindagkop Kabupaten Jombang dalam pemberdayaan usaha kecil ?
3. Apa bentuk Pemberdayaan terhadap usaha kecil yang dilakukan Disperindagkop ?
4. Apa saja kebijakan atau program yang disusun untuk memberdayakan Usaha Kecil?
5. Pola pembinaan seperti apa yang telah diterapkan Dinas?
6. Apakah yang menjadi sasaran dari pembinaan ini?
7. Strategi apa yang dilakukan Disperindagkop dalam pemberdayaan usaha kecil ?
8. Berapa jumlah dana kredit UKM yang telah dikucurkan ?
9. Dalam pembinaan adakah pihak ketiga yang ikut dalam pembinaan/
10. Kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan usaha kecil ?

• Kepada Pengusaha Kecil

1. Bagaimana perkembangan usahanya ?
2. Adakah keterlibatan Disperindagkop dalam perkembangan usahanya ?
3. Apakah pernah menerima bantuan ?
4. Apakah kendala dalam mengajukan permohonan kredit ?
5. Apakah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan disperindagkop ?
6. Pelatihan apa saja yang pernah diikuti ?
7. Adakah dampak terhadap usahanya setelah mengikuti pelatihan ?

Daftar Tabel

	Halaman
1. Jumlah Populasi Sentra Usaha Kecil	57
2. Pembinaan SDM	59
3. Pembinaan Teknologi	61
4. Daftar UKM yang telah mendapat kredit tahun 2007	63
5. Sumber Modal Pengusaha Kecil	66
6. Jangkauan Pasar Produk Usaha kecil Kabupaten Jombang	68
7. Pembinaan Administrasi Usaha	70
8. Bantuan yang Diharapkan	72



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan tidak merata serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan telah menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh. Rapuhnya fondasi perekonomian nasional telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing ekonomi nasional.

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran individu. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional, karena tujuan pembangunan ekonomi rakyat sesuai dengan amanat konstitusi yaitu: meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem ekonomi nasional harus diarahkan kepada sistem ekonomi kerakyatan yang memberikan prioritas pembangunan ekonomi pada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Krisis ekonomi telah menyadarkan bangsa ini bahwa roda perekonomian yang bertumpu pada sistem konglomerasi banyak yang ambruk. Konsep ekonomi kerakyatan menjadi solusi alternatif yang bertumpu pada potensi usaha-usaha kecil dan menengah. Sektor usaha kecil memiliki peran yang strategis baik secara ekonomi, sosial dan politis. Secara ekonomi usaha kecil menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan

kontribusi besar pada perolehan devisa negara. Melalui produk-produk manufaktur, barang kerajinan usaha kecil, perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu. Sektor UKM mampu menyumbang separoh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sosial politis, fungsi sektor usaha kecil sangat penting dalam hal penyerapan sektor tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Menurut Hanan (2003, 6-7), dari segi kuantitatif, pelaku usaha di Indonesia tercatat 41,36 juta unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 41,33 juta unit, atau 99,9% adalah usaha kecil menengah (UKM), sedangkan usaha besar hanya 0,005%. Dengan jumlah yang dominan itu, UKM mampu menyerap 99,45% dari seluruh jumlah tenaga kerja nasional (sekitar 76,97 juta orang). Selain itu sektor UKM menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10 % dari ekspor.

Selain itu, UKM di Indonesia mempunyai peran penting dalam hal penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2000, lebih dari 66 juta orang bekerja di Usaha Kecil, atau sekitar 99,44 % dari jumlah kesempatan kerja di Indonesia. Usaha menengah pada tahun 1999 memperkerjakan 7,1 juta orang dan naik 6,49 % atau hampir 460 ribu orang, sehingga menjadi 7,5 juta orang pada tahun 2000 (Tambunan, 2002 : 22).

Peran besar UKM tersebut menjadi sebuah ironi dengan karakteristik UKM secara umum yang digambarkan oleh Anoraga dan Sudantoko (2002:225-226) yang lebih banyak merupakan kelemahan yaitu:

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standart, kadangkala pembukuan tidak up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efesiensi jangka panjang
6. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standart dan harus transparan.

Kenyataan bahwa usaha kecil belum mampu dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan antara lain karena usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat eksternal maupun internal seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia maupun teknologi, serta iklim usaha yang kurang kondusif dan rendahnya kepedulian terhadap pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Pemberdayaan usaha kecil menjadi semacam kredo yang wajib dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu sarana untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas adalah dengan membuat suatu kebijaksanaan (policy) dari Pemerintah yang bertujuan murni untuk pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. Hal tersebut tercermin dalam pasal 33 dan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa *“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*. Pasal tersebut merupakan dasar atas bentuk ekonomi di Indonesia, yang akan lebih dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945. Asas demokrasi ekonomi tersirat dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut *“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi , produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat , maka kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”*

Demokrasi ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi kerakyatan bisa juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dari unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Dalam hal ini perusahaan besar tidak tergolong dalam bagian

ekonomi rakyat, namun tidak berarti pula bahwa perkembangan ekonomi rakyat hanya ditujukan pada perbaikan golongan miskin, tetapi merupakan sistem yang menggerakkan perekonomian nasional.

Sepanjang tahun 2007, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) boleh dikata sangat populer. Tidak sedikit dana dan program telah digulirkan untuk membantu upaya pemberdayaan UMKM di tanah air. Berbagai program , seperti KUBE, P2KP, PPK, PEMP, P4K, dan UPPKS telah dilaksanakan di berbagai daerah untuk membantu kebutuhan modal para pelaku UMKM agar segera lebih berdaya dan mampu berkembang mandiri meraih ceruk pasar yang selama ini belum tergarap.

Bahkan Pemerintah Indonesia mulai bulan November 2007 mencoba mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR), yaitu kredit tanpa agunan dengan plafon kredit sampai Rp 5 juta bagi pelaku UMKM, untuk tahap awal pemerintah menjamin dana maksimal Rp 14 triliun untuk pelaksanaan KUR (kompas, 2 januari 2008).

Pada konteks daerah, Jawa Timur merupakan salah satu yang menyambut baik dan berusaha membangun dan mengembangkan usaha kecil yang didukung oleh potensi yang dimiliki. Salah satu wilayah di Jawa Timur yang memprioritaskan pembangunan dan pengembangan usaha kecil adalah Kabupaten Jombang, yang memiliki bermacam-macam produk-produk unggulan yang berpotensi untuk dibangun dan dikembangkan.

Berangkat dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang dalam Pemberdayaan Usaha Kecil**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas., maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam memberdayakan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana Respon Pengusaha Kecil terhadap Pemberdayaan Usaha kecil di Kabupaten Jombang?

3. Kendala- kendala apa saja yang dihadapi dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam memberdayakan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui Respon Pengusaha Kecil dalam pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang

D. Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini, pada akhirnya manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut;

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi pembanding bagi penelitian yang telah lalu dan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dan ingin mendalami penelitian sejenis dimasa yang akan datang;
 - c. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Dinas terkait dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Kabupaten Jombang;
- b. Sebagai bahan masukan bagi Disperindagkop agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai pemberdayaan usaha kecil.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum tentang isi skripsi ini. Secara garis besar penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, bab ini pembahasannya diawali dengan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sebagai penutup menguraikan tentang sistematika pembahasan;
- Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu sosial yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi ini, dalam hal ini menyangkut konsep usaha kecil.
- Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Karena metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, maka uraian dalam bab ini menggunakan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, dan jenis analisis;
- Bab IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang data hasil penelitian, analisa data, dan interpretasi data;
- Bab V : Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran, didalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal penting secara garis besar, sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan bagi Pemerintah daerah dalam hal ini terhadap Dinas terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Ada berbagai pengertian mengenai usaha kecil yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, diantaranya :

1. Menurut SK Menperindag No.589/MPP/10/1999

Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp.200.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Menurut UU No.9 tahun 1995

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar Rp.1.000.000.000 atau kurang.

3. Menurut Inpres No.10 tahun 1999

Usaha Kecil Menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan dibawah Rp.10.000.000.000, sedangkan diatas itu sudah termasuk industri besar.

4. Menurut Departemen Perindustrian

Usaha kecil adalah merupakan usaha yang nilai asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) benilai kurang dari Rp.600.000.000.

5. Menurut Bank Indonesia

Usaha Kecil Menengah adalah unit kegiatan usaha yang memiliki kapasitas kurang dari Rp.50.000.000.000.

6. Menurut Kadin

Usaha Kecil adalah kegiatan yang memiliki modal kerja kurang dari Rp.150.000.000 dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp.600.000.000.

7. Menurut Asian Development Bank

Usaha Kecil Menengah adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dengan tenaga kerja sampai 100 orang dengan nilai kredit yang diperlukan Rp.5.000.000.000.

2. Karakteristik Usaha Kecil

Menurut Titik Satika Pratomo dan Abdul Rachman Soejoedono (2002:23), Selain sudut pandang secara umum, karakteristik usaha kecil dapat dipandang dari segi manajemen dan segi keuangan.

Karakteristik usaha kecil dari segi manajemen adalah sebagai berikut :

- a) Pemilik industri kecil merangkap sebagai pengelola
- b) Berkembang dari usaha kecil-kecilan
- c) Tidak memiliki perencanaan tertulis
- d) Kurang membuat catatan atau pembukuan tertib
- e) Pendelegasian wewenang secara lisan
- f) Kurang mampu mempertahankan mutu
- g) Sangat tergantung pada pelanggan dan pemasok sekitar usahanya
- h) Kurang membina saluran informasi
- i) Kurang mampu membina hubungan perbankan

Sedangkan, karakteristik usaha kecil dari segi keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki usaha kecil-kecilan, bermodal sedikit dana dan ketrampilan pemilikan
- b) Terbatasnya sumber dana dari perbankan
- c) Kemampuan memperoleh pinjaman dari bank relatif rendah, karena kurang mampu menyediakan jaminan, proposal kredit dan lain-lain.
- d) Kurang memiliki keakuratan perencanaan anggaran kas
- e) Tidak memiliki catatan harga pokok produksi serta memiliki perhitungan secara kasar
- f) Kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan atau akuntansi
- g) Kurang paham tentang prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan dan analisisnya

- h) Kurang mampu memilih informasi yang berguna bagi usahanya

3. Macam-Macam Usaha Kecil

Menurut M.Tohar (2000:75), Usaha Kecil dapat digolongkan menurut bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukan, bentuk dan jenis usaha kecil dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain sebagai berikut :

- 1) Ditinjau dari hakikat dan penggolongannya dapat di bedakan menjadi tiga :
 - a. Industri kecil
 - b. Perusahaan berskala kecil
 - c. Sektor Informal
- 2) Ditinjau dari bentuknya perusahaan yang ada di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua yaitu :
 - a. Usaha perseorangan
 - b. Usaha persekutuan/partnership
- 3). Ditinjau dari jenis produk/jasa yang dihasilkan maupun aktifitas yang dilakukan dapat dibedakan menjadi empat yaitu :
 - a. Usaha perdagangan
 - b. Usaha pertanian
 - c. Usaha industri
 - d. Usaha jasa

Badan Pusat Statistik dalam Arsyad (2004:176) menggolongkan perusahaan/jasa industri di Indonesia ke dalam empat kategori berdasarkan jumlah pekerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau usaha tanpa memperhatikan besarnya modal ataupun kekuatan mesin yang digunaka. Empat kategori tersebut adalah

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga, yaitu perusahaan atau usaha industri yang mempunyai pekerja 1-4 orang.
2. Industri Kecil, yaitu perusahaan atau usaha industri yang mempunyai pekerja 5-9 orang.
3. Industri Sedang, yaitu perusahaan atau usaha industri yang mempunyai pekerja 20-99 orang.

4. Industri Besar, yaitu perusahaan atau usaha industri yang mempunyai 100 orang atau lebih pekerja.

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustriaan dan Perdagangan Republik Indonesia No.589 tahun 1999, industri dibagi 3, yaitu :

- 1) Industri hulu atau industri dasar

Industri yang mengolah sumber atau bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi yang padat modal

- 2) Industri hilir/industri Aneka

Industri yang mengolah sumber daya alam dan energi (pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi) dan industri manufaktur.

- 3) Industri kecil

Digambarkan sebagai industri padat karya yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lain terutama sektor pertanian.

4. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil

a) Kelebihan

Menurut M.Tohar (200:28), Kelebihan dan daya tarik yang dimiliki UKM antara lain :

1. Pemilik merangkap manajer perusahaan dan menjalankan semua fungsi manajerial seperti marketing, finance dan administrasi.
2. Dalam pengelolaan tidak memerlukan keahlian manajerial yang handal.
3. Sebagian besar membuat lapangan kerja baru, inovasi sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
4. Resiko usaha menjadi beban pemilik.
5. Bebas menentukan harga produksi barang dan jasa
6. Prosedur hukumnya sederhana
7. Pajak relatif ringan karena yang dikenakan pajak adalah pribadi atau pengusaha bukan perusahaan
8. Mudah dalam proses pendirian
9. Mudah dibubarkan
10. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu
11. Pemilik menerima seluruh laba

12. Umumnya mempunyai kemampuan survive
13. Diversifikasi terbuka lebar atau luas, sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa terjadi melalui kreativitas pengelola
14. Tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi dan sarana produksi lainnya tidak terlalu mahal
15. Mempunyai ketergantungan secara moril dan semangat usaha dengan pengusaha kecil lainnya.

Sedangkan Menurut Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko (2002 : 225) kelebihan yang dimiliki usaha kecil dibandingkan sektor lain adalah :

1. Usaha kecil beroperasi menebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha. Hal ini karena banyak usaha kecil timbul untuk memenuhi permintaan (agregate demand) yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa jadi orientasi konsumen. Untuk itu diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian tinggi. Dengan penyebaran usaha kecil, berarti masalah urbanisasi dan kesenjangan sosial antara desa dan kota dapat ditekan. Setidaknya hal ini bisa mengurangi konsentrasi intensitas lapangan kerja pada daerah tertentu yang akan menimbulkan efek urbanisasi serta masalah sosial lainnya.
2. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah. Sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja karena yang dipertaruhkan kecil, implikasinya usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk keluar masuk pasar. Dengan demikian, kegiatan produksi dapat dihentikan sewaktu-waktu, jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang menguntungkan, konsekuensi lain dari rendahnya aktiva tetap adalah mudah meng-up to date-kan produknya, sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.
3. Sebagian besar usaha kecil dikatakan padat karya yang disebabkan penggunaan teknologi yang sederhana. Persentase distribusi nilai tambah pada tenaga kerja relatif besar. Dengan demikian, distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan sehingga mengurangi terjadinya PHK. Hal

ini menunjukkan bahwa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi yang tinggi.

b) Kelemahan

Menurut M.Tohar (2000:29), Kelemahan UKM dipengaruhi oleh dua faktor, faktor intern dan ekstern.

1. faktor intern adalah

- a. Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak memenuhi ketentuan pembukuan standart.
- b. Pembagian kerja yang tidak proporsional dan karyawan bekerja tidak sesuai dengan jam kerja standar
- c. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja, karena tidak ada perencanaan kas
- d. Persediaan barang terlalu banyak, sehingga beberapa jenis barang menjadi kurang laku
- e. Sering terjadi mis manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial
- f. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik
- g. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada, atau belum pernah dirumuskan

2. faktor ekstern adalah

- a. Resiko dan hutang-hutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik
- b. Kekurangan informasi bisnis, hanya mengenai pada intuisi dan ambisi pengelola serta kurangnya promosi
- c. Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran utang tunai

Menurut Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko (2002: 226) terdapat kelemahan pada usaha kecil yaitu :

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standart kadangkala pembukuan tidak up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.

- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan sangat terbatas
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Selain kelemahan diatas, Menurut Ahmad Erani Yustika (2003 :115-116) masih terdapat kelemahan yang ada pada usaha kecil, yaitu

- a. Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana
- b. Struktur organisasi bersifat sedehana
- c. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar
- d. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan.
- e. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan tidak memiliki sama sekali
- f. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya
- g. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas
- h. Margin keuntungan sangat tipis

5. Masalah yang dihadapi Usaha Kecil

Menurut Hiro Tugiman (1995:9-15) :Terdapat beberapa permasalahan pokok yang yang dihadapi oleh UKM. Antara lain :

- a. Masalah SDM
- b. Masalah pemasaran
- c. Masalah permodalan
- d. Masalah penyediaan bahan baku
- e. Masalah teknologi (berkaitan dengan standart industri)
- f. Masalah organisasi dan manajemen

- g. Masalah infrastruktur
- h. Masalah kerja sama usaha
- i. Kurang wawasan usaha
- j. Masalah pesaing
- k. Masalah generasi penerus
- l. Tidak adanya akses kepada usaha besar atau pemerintah
- m. Masalah dari segi konsumen

Sedangkan Duu dan Brandsreet, Inc dalam Yusuf irianto (1996:18) mengemukakan tujuh poin permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil yaitu:

- a. Kelalaian (negleck)
- b. Tindak kecurangan (frand)
- c. Tidak memiliki pengalaman dalam bisnis yang dijalankan (Lack of experience line)
- d. Tidak memiliki pengalaman manajerial (lack of manajerial experince)
- e. Pengalaman yang tidak sesuai dengan bisnisnya (unbalanced experience)
- f. Tidak kompeten (uncompetence)
- g. Bencana (Disaster)

B. Konsep Pemberdayaan Usaha Kecil

1. Arti Pemberdayaan

Menurut Oxforth English Dictionary dalam Ida Ayu Nyoman Saskara (2007: 3), arti Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment*, yang berasal dari kata *empower* yang mengandung dua pengertian: (i) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) *to give abilty to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan) Secara tersirat, makna tersebut menyatakan bahwa konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industri yang kurang memihak pada rakyat mayoritas.

Menurut Ife dalam Ida Ayu Nyoman Saskara (2007: 4) "*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community. Empowerment should be aim of all community*

development". Lebih lanjut mengatakan bahwa *"a complete strategy of empowerment requires the barriers to people exercising power be understood, addressed and overcome. These include the structures of oppression (class, gender and race / ethnicity), language, education, personal mobility, and the domination by elites of power structures of society. Understood in these theme, then, empowering is a form of radical change, whing would overturn exiting strucutres of domination"*.

Sedangkan, Friedmann dalam Ida Ayu Nyoman Saskara (2007: 4) dalam mendefinisikan pemberdayaan sebagai: *"The approach to alternative development described in the preceding point builds on people's own initiatives, with the state playing essentially an enabling, facilitating, and supportive role. State agencies should prepare themselves accordingly to create the capability of responding to local initiatives rther than impose dramatic initiatives of their own"*.

Sedangkan menurut Pranarka dan Prijono (1996:56-57), konsep pemberdayaan atau empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri.

Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Pemberdayaan tidak berarti melepaskan tanggung jawab tentang apa yang terjadi dalam tim, departemen, bagian, atau organisasi. Pemberdayaan berarti upaya menemukan keseimbangan yang tepat antara struktur dan pengendalian manajemen yang longgar versus yang ketat. Di samping itu pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Oleh sebab itu pemberdayaan disini pada hakekatnya memberikan kewenangan pada sasaran individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai subyek bukan lagi sebagai obyek dari dunianya sendiri. .

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996: 24), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

2. Pemberdayaan Usaha Kecil

Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

3. Pentingnya Pemberdayaan Industri Kecil

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia tampaknya merupakan pukulan telak bagi pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Banyaknya pemutusan kerja pada industri besar telah memperburuk permasalahan yang sudah ada sebelumnya, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Kondisi ini menyadarkan bahwa pengembangan Industri kecil merupakan suatu keharusan, dan bukan hanya sebagai usaha dalam rangka pemerataan pembangunan, tapi Industri Kecil telah menunjukkan dirinya sebagai struktur sosial yang dapat menyerap tenaga kerja dengan investasi kecil berproduksi secara efektif.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi aspek pokok yang dimiliki oleh Industri kecil dan kerajinan dalam perekonomian Indonesia yaitu:

1. Sebagian besar populasi industri kecil dan kerajinan rumah tangga berlokasi di daerah pedesaan sehingga jika dikaitkan dengan kenyataan tenaga kerja yang makin meningkat serta luas garapan yang relatif berkurang, industri kecil merupakan jalan keluar.

2. Beberapa industri kecil dan kerajinan rumah tangga banyak menggunakan bahan baku dari sumber-sumber di lingkungan terdekat telah menyebabkan biaya produksi dapat ditekan rendah.
3. Harga jual yang relatif rendah serta tingkat pendapatan kelompok yang rendah sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang tersendiri yang memberi peluang bagi industri kecil dan kerajinan rumah tangga untuk bertahan
4. Tetap adanya permintaan terhadap beberapa jenis komoditi yang tidak diproduksi secara massal (misalnya batik tulis dan ukir-ukiran) juga merupakan aspek pendukung yang kuat. (Irsan Azhari Saleh, 1986:11)

Selain itu Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam Irsan Azhari Saleh (1986: 13) juga menambahkan tentang alasan-alasan betapa pentingnya pengembangan Industri kecil, yaitu:

Fleksibilitas dan adaptabilitasnya yang ditopang oleh kemudahan relatif dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan, relevansinya terhadap proses desentralisasi kegiatan ekonomi juga menunjang terciptanya integrasi kegiatan sektor-sektor ekonomi yang lain, potensinya terhadap penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pengangguran serta dalam jangka panjang, perannya sebagai basis bagi suatu kemandirian pembangunan ekonomi.(1986:xii)

R. R Suprpto (2002 :8), mengungkapkan bahwa alasan-alasan yang mendukung pentingnya pemberdayaan UKM, yaitu :

1. Masalah Fleksibilitas dan adaptabilitas di dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan;
2. Relevansinya dalam proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integrasi kegiatan pada sektor ekonomi lain;
3. Peranan jangka panjang sebagai basis bagi mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena industri kecil ini umumnya diusahakan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor rendah;
4. Potensi terhadap penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pengangguran

Selanjutnya Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika (2003:76), mengungkapkan bahwa keadaan yang diperlukan agar pemberdayaan UKM dapat dilaksanakan adalah

1. Lingkungan non kompetitif;
2. akses pendanaan
3. kompetensi teknis dan pengelolaan; dan
4. Dasar hukum

Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika juga menjelaskan bahwa sangat disayangkan karena di Indonesia (dan seperti halnya di negara-negara berkembang) keadaan tersebut belum sepenuhnya tercipta. Sampai saat ini masih ada begitu banyak permasalahan yang berhubungan dengan persaingan domestik, pendanaan, keterbatasan teknis serta belum adanya dasar hukum dan perundang-undangan.

Dari wacana yang telah dipaparkan diatas memberikan masukan bahwa pemberdayaan usaha kecil merupakan suatu hal yang sangat penting bagi upaya penciptaan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Usaha Kecil

Pengembangan industri kecil sebagai salah satu strategi dan kebijakan nasional memiliki peran penting dalam membangun dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sumbangan industri kecil dalam sektor pembangunan nasional merupakan wujud nyata yang tidak diperlu disangsikan lagi, seperti dapat menyerap banyak tenaga kerja. Disisi lain. Potensi yang dimiliki oleh industri kecil yang cukup besar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, utamanya di daerah pedesaan. Oleh karena itu langkah-langkah pengembangan harus segera diterapkan untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada.

Upaya pengembangan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan berupa perangkat lunak maupun keras. Menurut Syahril Syarif (1991:3) bahwa bentuk-bentuk pengembangan meliputi :

1. Perangkat lunak meliputi :
 - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
 - pembinaan usaha
 - bantuan promosi dagang

- keringanan dan kemudahan yang diberikan pada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha
- 2. Perangkat Keras, meliputi :
 - menyediakan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha pada sentra-sentra industri kecil
 - bantuan langsung pada pengusaha kecil seperti penyediaan tempat usaha dan bantuan permodalan.

Disisi lain, pembinaan atas iklim usaha sebagai faktor eksternal dalam berusaha juga perlu mendapatkan perhatian karena hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri kecil.

Menurut Hetifah Syaifudin (1995:24-25) diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil. Yang dalam hal ini diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat :
 - a. Memperbesar partisipasi golongan ekonomi lemah dalam kegiatan ekonomi
 - b. Menciptakan situasi yang distribusif sehingga pembangunan yang cenderung padat modal bergeser pada situasi nyang lebih memperluas kesempatan bagi mata pencaharian rakyat banyak.
 - c. Mengubah situasi ekonomi yang terlanjur terpusat dan ekstraktif menjadi lebih tersebar manfaatnya bagi rakyat banyak.
 - d. Mendistribusikan faktor produksi yang terlanjur dikuasai sekelompok orang, agar kepemilikan dan pengusaannya lebih terdistribusikan pada rakyat banyak.
2. Mewujudkan usaha kecil menjadi usaha yang efesien, sehat dan memiliki tingkat pertumbuhan tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional.
3. Menciptakan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat memperkuat kedudukan usaha kecil dalam kompetisi ditingkat nasional maupun internasioanal

Perhatian yang serius dari pemerintah sangat diperlukan dalam pembinaan usaha kecil. Pembinaan dan pengembangan ini sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM, permodalan, teknologi dan perluasan pasar.

5. Strategi Pemberdayaan

Pengertian strategi disini sebagai suatu cara yang sistematis dan berbagai langkah dan kebijakan yang akan ditempuh bagi penyeleggaraan pengembangan yang efektif sesuai dengan situasi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki oleh usahawan itu.

Pelaksanaan pengembangan yang baik memerlukan suatu strategi yang baik pula. Hal ini diperlukan agar nantinya selama proses kegiatan berlangsung, materi-materi yang akan disampaikan dapat diterima secara utuh dan memberikan respon positif bagi pengusaha dalam rangka mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki..

Strategi yang akan diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil menurut Hetifah Syaifudin (1995:66-75) ialah :

1. Strategi peningkatan kemampuan finansial

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui penyertaan modal sementara.

2. Pengembangan pemasaran

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas, terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional; hal ini merupakan peluang, tantangan sekaligus ancaman bagi usaha kecil. Terdapat tiga cara strategi pengembangan pemasaran, yaitu :

a. Meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar

Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan (vertikal) subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pola subkontrak ini memberi manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh

jaminan pasar dan kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah bahan baku, kadang-kadang juga modal.

b. Proteksi pasar

Bentuk proteksi dalam hal ini melalui konsumsi. Sekitar 10 % dari total anggaran Pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk buatan usaha kecil. Selanjutnya penutupan sektor usaha tertentu dari investasi dari ekspor tekstil dan tekstil diprioritaskan bagi industri kecil. Hal ini patut dipertanyakan mengenai seberapa jauh peluang yang bisa dimanfaatkan industri kecil, mengingat adanya keterbatasan penguasaan teknologi dapat menjadi hambatan untuk bersaing di pasar internasional. Terlebih dengan diterapkannya standarisasi produk (ISO 9000), properti right serta ecolabeling. Seberapa besar keuntungan yang akan diraih oleh usaha kecil serta beban yang harus ditanggungnya belum jelas.

c. Menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing

Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar, modal bukanlah kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan disini antara lain mendorong iklim persaingan dan reorientasi lembaga koperasi ke arah bisnis. Dalam konteks ini fungsi kontrol sangat diperlukan.

3. *Pengembangan SDM*

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar melalui sistem pemagangan (link and match) serta pemberian insentif bagi pertumbuhan pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SDM dan teknologi.

4. *Strategi pengaturan dan pengendalian*

a. Pengaturan dan perijinan

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada 4 (empat) jenis perijinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha kecil yaitu ijin tempat usaha (kelayakan usaha, lokasi serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan), ijin usaha industri serta ijin perdagangan. Pada lokasi tertentu usaha kecil tidak wajib memiliki SITU serta surat tanda pendaftaran industri kecil untuk sentra industri.

b. Perencanaan tata ruang

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan usaha kecil melalui :

1. Pelibatan kepentingan usaha kecil dalam perencanaan kota,
2. Proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan,
3. Pengakuan sungguh terhadap peran dan fungsi usaha kecil bagi lingkungan masyarakat kota.

5. *Fungsi kelembagaan*

Dalam hal ini, reorganisasi di dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Dinas perindustrian dan Perdagangan, Depdagri serta BAPPENAS adalah merupakan inisiatif untuk mengembangkan usaha kecil secara terpadu dan berjangka panjang yang sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bidang pembinaan, pengawasan dan pengembangan industri kecil dilebur ke dalam struktur vertikal (subsektor) memberi peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.

Dengan memperhatikan strategi-strategi yang dipaparkan diatas, maka diharapkan upaya pengembangan industri kecil akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

C. Pemberdayaan Usaha kecil di Kabupaten Jombang

1. Kondisi Usaha Kecil di Kabupaten Jombang

Wilayah Kabupaten Jombang memiliki berbagai macam industri, dimana penggolongan usaha industri berdasarkan nilai investasi dapat digolongkan menjadi Industri Kecil, Menengah dan Besar, dimana nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan menurut tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Industri Besar adalah perusahaan atau usaha yang mempunyai tenaga kerja sejumlah 100 orang atau lebih;
2. Industri Sedang adalah perusahaan atau usaha yang mempunyai tenaga kerja sejumlah 20-99 orang;
3. Industri kecil adalah perusahaan atau usaha yang mempunyai tenaga kerja sejumlah 5-19 orang;
4. Industri kerajinan rumah tangga adalah perusahaan atau usaha yang mempunyai tenaga kerja sejumlah 1-4 orang.

Kabupaten Jombang mempunyai banyak usaha kecil yang perlu untuk dikembangkan dan mendapat perhatian dari pemerintah. Usaha kecil yang berada di 21 Kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Jombang sangat potensial untuk dikembangkan, baik dari segi produksi maupun pemasarannya. Keberadaan dari sentra usaha kecil ada yang mengelompok dan ada yang menyebar :

- a. Lokasi atau posisi usaha yang mengelompok disebabkan karena usahanya turun temurun dan bahan baku untuk industrinya banyak terdapat di daerah tersebut dan secara historis hanya pada daerah itu saja yang dapat mengelola dan mengembangkan usaha tersebut, disamping tenaga-tenaga ahlinya hanya pada daerah tersebut. Ini dapat dilihat seperti sentra industri cor kuningan, pande besi, kerajinan manik-manik, kerajinan dompet, anyaman bambu, genteng, usaha mebel, kebun jeruk dan gips.
- b. Lokasi yang menyebar dikarenakan usaha tersebut dapat dilaksanakan atau dikembangkan di daerah mana saja seperti perdagangan , jasa dan industri hasil pertanian. Dalam hal ini tidak memerlukan suatu lokasi khusus untuk mendapatkan bahan baku maupun keahlian dalam pembuatannya.

Dengan demikian dapat dilakukan pengelompokan dalam arah pembangunan dan arah pengembangan usaha kecil yang sesuai dengan keberadaan lokasi usaha kecil tersebut.

Beberapa produk unggulan yang berpotensi dikembangkan dimasa mendatang di masing-masing sektor pembangunan di Kabupaten Jombang antara lain :

- a. Pertanian : Budidaya Jeruk Nipis, Budidaya Salak, Budidaya Mujaer, Budidaya Lele
- b. Jasa : Konstruksi, Huller keliling
- c. Non Pertanian : Industri Dompot, Industri Manik-manik, Industri Genteng, Industri Mebel, Kerajinan Gibs, kerajinan Anyaman Bambu.
- d. Perdagangan : Perdagangan Buah-buahan
- e. Aneka Usaha : Industri Cor kuningan, Pande Besi

Penentuan potensi usaha kecil unggulan di Kabupaten Jombang mempertimbangkan potensi dari beberapa aspek berikut :

1. Aspek Manajemen

Kemampuan manajemen usaha kecil mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain : sumber daya manusia pendukung proses produksi, aspek permodalan yang mendukung operasional, aspek produksi, aspek penjualan dan aspek kemitraan usaha.

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pendukung usaha kecil unggulan di Kabupaten Jombang mempertimbangkan beberapa hal meliputi pendidikan pemilik, pengembangan diri pemilik, pelatihan yang pernah diikuti, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, rata pendidikan pekerja, sistem penarikan tenaga kerja, sistem imbalan.

Kemudian, pengembangan diri pemilik cukup dengan belajar mandiri, serta pengalaman dari orang sekitar yang telah berkecimpung dalam usaha yang sama. Untuk pengembangan usahanya, pemilik usaha kecil unggulan tidak memerlukan pelatihan khusus dari lembaga tertentu. Dari sisi sosial, usaha kecil yang menyerap banyak tenaga kerja di sekitar lokasi usaha, sehingga dapat

dikatakan bahwa usaha kecil yang potensial adalah usaha kecil yang turut mengatasi permasalahan sosial atau dengan kata lain turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi usaha..

Latar belakang pendidikan pekerja tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, minimal sekolah dasar dan maksimal sekolah lanjutan tingkat pertama atau pernah sekolah di sekolah menengah umum. Sedangkan sistem penarikan tenaga kerja cukup sederhana, berasal dari keluarga sendiri atau dari sekitar lokasi usaha.

b. Aspek Permodalan

Permodalan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : sumber dana awal usaha, sumber dana tambahan dan modal tambahan yang dibutuhkan. Usaha kecil unggulan di Kabupaten Jombang yang potensial adalah usaha mandiri yang sumber pendanaan awal operasi usaha tidak tergantung pada pihak lain melainkan dari modal sendiri atau tabungan.

Setelah operasi berjalan beberapa waktu, dana tambahan yang dibutuhkan dapat berasal dari pihak lain seperti pinjaman dari keluarga, teman atau bank. Modal tambahan digunakan untuk investasi (memperbesar usaha melalui ekspansi pasar), memperbaiki tempat usaha, memperbaiki peralatan produksi yang sudah rusak, mengganti peralatan produksi atau pengganti dan menambah peralatan usaha.

c. Aspek Produksi

Aspek produksi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : bahan baku, kapasitas produksi serta produk yang cepat terjual. Usaha kecil unggulan di Kabupaten Jombang yang potensial dipandang dari aspek produksi adalah usaha yang bahan bakunya mudah didapat, berasal dari lokasi usaha (lokal), cara pembelian bahan baku mudah dan cepat serta kualitas bahan baku yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan produksi. Kapasitas produksi per hari disesuaikan dengan kapasitas mesin serta pendukung operasional yang lain. Produk yang potensial adalah produk yang cepat terjual.

d. Aspek Penjualan

Aspek penjualan mempertimbangkan sistem penjualan, sistem pembayaran, pasar yang dilayani dan tingkat persaingan secara umum. Usaha

kecil unggulan di Kabupaten Jombang yang potensial adalah usaha yang sistem penjualannya diantarkan langsung pada konsumen atau dapat juga melalui perantara asalkan tidak melalui rantai yang panjang. Sistem pembayaran barang dagangan secara tunai dan tidak membiarkan periode piutang yang lama. Pasar yang dilayani adalah pasar lokal, regional maupun internasional.

e. Kemitraan Usaha

Kemitraan usaha mempertimbangkan pola kemitraan yang dijalin dan manfaat melalui kemitraan usaha. Usaha kecil unggulan di Kabupaten Jombang yang potensial dipandang dari sudut kemitraan usaha adalah usaha yang menjalin kemitraan dengan pihak pendukung diantaranya perbankan, pihak pemasok, perusahaan besar, koperasi, pihak swasta dan pihak lainnya yang mendukung pengembangan usaha kecil tersebut.

2. Akses Pasar

Usaha kecil yang memenuhi akses pasar berarti produk yang dihasilkan oleh usaha kecil tersebut memiliki cakupan pasar yang luas dan memenuhi semua segmen yang ada. Hal ini berarti produk terjangkau oleh konsumen dan mudah didapatkan. Selain itu, produk memiliki potensi untuk dikembangkan pemasarannya (ekspansi pasar) bila terdapat investasi besar.

Produk-prодук usaha kecil di Kabupaten Jombang yang diprioritaskan untuk dijadikan produk unggulan didasarkan pada keunggulan-keunggulan, terutama pada kualitas produk, potensi wilayah Kabupaten Jombang yang mendukung proses produksi, bahan baku yang mudah didapat dengan kualitas sesuai serta teknologi yang menunjang. Selain itu, produk usaha kecil yang memenuhi akses pasar yang luas dan memenuhi semua segmen juga menjadi prioritas menjadi produk usaha kecil unggulan.

2. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang

Pembinaan, pembangunan dan pengembangan usaha kecil harus selalu dilakukan oleh Pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil, yaitu : “ *Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan*

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri “. Berdasarkan Undang-undang tersebut dinyatakan antara lain :

1. Dalam Pembangunan Nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi
2. Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomio di masa yang akan datang.

Secara umum, Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil memberikan penjelasan : “ *Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumberdaya manusia tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas*”.

Pada era otonomi daerah, peran Pemerintah Kabupaten harus lebih dapat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan dalam pembinaan, pembangunan dan pengembangan usaha kecil yang pada umumnya banyak terdapat di Wilayah pedesaan.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Jombang diarahkan pada beberapa produk usaha kecil unggulan di Kabupaten Jombang, yang diprioritaskan untuk dibina dan dikembangkan meliputi aktivitas usaha kecil pada sektor usaha sebagai berikut :

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Non Pertanian
- c. Sektor Perdagangan
- d. Sektor Aneka Usaha
- e. Sektor Jasa

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Kecil Kabupaten Jombang, yaitu :

a. Sasaran Pengembangan Usaha Kecil di kabupaten Jombang

Titik berat pembangunan sektor usaha kecil adalah pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, pemerataan dan perluasan lapangan kerja khususnya di daerah pedesaan yang mempunyai klasifikasi terbelakang, kritis dan miskin. Secara umum sasaran pembangunan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumberdaya manusia para pelaku usaha kecil di Kabupaten Jombang, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan siap menghadapi era perdagangan bebas.
2. Penguasaan teknologi tepat guna para pelaku usaha kecil di Kabupaten Jombang.
3. Peningkatan daya saing usaha kecil di Kabupaten Jombang melalui prioritas membina dan mengembangkan produk usaha kecil unggulan.
4. Sektor usaha kecil yang mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja sebagai wujud pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pengembangan akses pasar hasil usaha kecil di Kabupaten Jombang.
6. Pengembangan sektor usaha kecil yang berbahan baku lokal (wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya).
7. Keterkaitan antara sektor usaha kecil dengan sektor-sektor pembangunan yang lain, khususnya dalam rangka memperkuat struktur ekonomi pedesaan di wilayah Kabupaten Jombang.

b. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang

Pembangunan dan Pengembangan usaha kecil di Kabupaten jombang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Menunjang pembangunan daerah secara umum dan menciptakan struktur usaha kecil yang kokoh di Kabupaten Jombang secara khusus sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten Jombang, melalui:
 - a. Meningkatkan produksi barang dan jasa usaha kecil bermutu dengan harga yang bersaing baik untuk memenuhi kebutuhan lokal Kabupaten Jombang, regional Jawa Timur maupun nasional.

- b. Mendayagunakan sumber daya alam, energi dan teknologi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian dan kemampuan daya dukung wilayah Kabupaten Jombang.
- c. Menjadikan usaha kecil sebagai wahana untuk pemerataan pembangunan sehingga dapat menciptakan perekonomian yang kokoh, efisien dan efektif di Kabupaten Jombang.
- d. Mengatasi masalah sosial di Kabupaten Jombang melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja pada sektor usaha kecil di Kabupaten Jombang sehingga mampu mendorong peningkatan program padat karya dan penciptaan lapangan kerja baru.

2. Peningkatan nilai tambah pembangunan di Kabupaten Jombang melalui ;

- a. Menunjang kegiatan sektor usaha kecil yang berbasis pada penerapan teknologi tepat guna.
- b. Pemanfaatan sumberdaya alam yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan daerah dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan sumbangan sektor usaha kecil terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jombang.

c. Arah Pembangunan dan Pengembangan Usaha Kecil Potensial di Kabupaten Jombang

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan dan pengembangan usaha kecil Kabupaten Jombang diarahkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor usaha kecil, melalui pembinaan kemampuan dan ketrampilan pengusaha dan tenaga kerja di Kabupaten Jombang.
2. Peningkatan kemampuan teknis dalam sektor usaha kecil melalui pelatihan teknis oleh instansi terkait di Kabupaten Jombang.
3. Pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Jombang.
4. Penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan sektor usaha kecil di Kabupaten Jombang.

5. Mendorong terbentuknya sentra-sentra usaha kecil di Kabupaten Jombang dengan tetap memperhatikan pola penataan ruang dan fungsi kelestarian lingkungan hidup.
6. Menciptakan usaha kecil yang dapat menunjang sektor pembangunan yang lain di Kabupaten Jombang.
7. Menciptakan sinergi antara pengusaha kecil, penyedia modal masyarakat, swasta dan Pemerintah Kabupaten Jombang.
8. Peningkatan kualitas instansi-instansi yang terkait dengan model pembangunan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Jombang.
9. Mendorong pembangunan usaha kecil yang ditujukan pada upaya penyelamatan usaha kecil yang terkait dengan dampak krisis ekonomi agar mampu kembali aktif dalam melakukan proses produksi.
10. Menciptakan pengembangan usaha di bidang perdagangan untuk meningkatkan perekonomian daerah yang kokoh, efisien dan efektif, menciptakan dan memperluas pasar, menciptakan harga pasar yang wajar, memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pendapatan produsen, utamanya produsen bahan pangan yang didukung dengan peraturan perundangan untuk melindungi kepentingan produsen maupun konsumen.
11. Mendorong pembangunan di sektor pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani, terwujudnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh yang mampu meningkatkan hasil dan mutu produksi sehingga akan meningkatkan daya saing dan perluasan pasar produk pertanian melalui pola pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
12. Menciptakan perlindungan hak cipta dan standarisasi untuk mendorong adanya inovasi dan peningkatan mutu produksi usaha kecil di Kabupaten Jombang.
13. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan daya tarik untuk mendorong masuknya investasi di Kabupaten Jombang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk memahami suatu objek yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah.

Awal adanya penelitian adalah adanya suatu masalah didalam masyarakat dan dibutuhkan suatu usaha untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi maksud penelitian sebagaimana dimaksudkan oleh Koentjaraningrat (1981:22) adalah suatu usaha untuk dengan sengaja menangkap gejala-gejala tadi berdasarkan disiplin metodologi ilmiah dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip baru dibelakang gejala-gejala tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan dengan tujuan untuk menangkap gejala-gejala yang ada dan dijadikan dasar untuk penyelesaian suatu masalah.

Penelitian yang dilakukan ini digolongkan dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah “ penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.” Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu/organisasi tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh ada isolasi terhadap individu/organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan” (Moleong, 1994:3).

Kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam suatu uraian sistematis, faktual, akurat dan jelas, bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara satu gejala dengan gejala yang lainnya di masyarakat.

Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang diidentifikasi diatas didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti telaah atas dokumen atau laporan-laporan yang terkait baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang data diformulasikan dalam bentuk kata-kata. Dengan demikian nampak jelas bahwa penelitian yang dilakukan masuk kategori deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menghendaki batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Dengan kata lain fokus sangat penting artinya untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga akan memperjelas batasan dan juga mempertajam pemahaman.

Menurut Moleong (2000:273) fokus penelitian merupakan suatu penetapan masalah dalam penelitian. Tingkat kesulitan justru ada pada penentuan fokus penelitian. Jika salah dalam menentukan fokus penelitian maka hasilnya akan menjadi tidak baik pula.

Dalam penelitian ini juga telah ditetapkan fokus penelitian dan sesuai dengan judul penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Upaya Pemberdayaan Industri Kecil di Kabupaten Jombang yang meliputi :
 1. Bidang SDM
 2. Bidang Teknologi
 3. Bidang Permodalan
 4. Bidang Pemasaran
 5. Bidang Administrasi Usaha
2. Respon Pengusaha Kecil terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang
3. Kendala dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang
 1. Kendala Kedinasan
 2. Kendala Pengusaha Kecil
 - a. Kualitas SDM pengusaha yang lemah
 - b. Permodalan
 - c. Sistem Manajemen yang kurang baik

- d. Lemahnya penguasaan teknologi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, maka penelitian ini berada di lokasi Kabupaten Jombang dengan beberapa pertimbangan antara lain :

- a) Ditinjau dari faktor geografis, Kabupaten Jombang merupakan jalur perdagangan antara Jawa Timur menuju Jawa Tengah dan Jakarta yang memiliki potensi ekonomi yang mendukung perkembangan usaha kecil.
- b) Kabupaten Jombang memiliki lokasi yang dekat dengan pusat pasar atau perdagangan (Surabaya, Malang, Kediri dan sekitarnya).
- c) Kondisi geografis yang sebagian besar memiliki posisi datar lebih mendukung sarana dan prasarana pembangunan pengembangan usaha kecil.
- d) Kabupaten Jombang memiliki bermacam-macam produk usaha kecil unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau peristiwa dimana peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Berkaitan dengan hal yang dimaksud, maka situs penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang usaha kecil di Kabupaten Jombang.
- 2) Sampel usaha-usaha kecil di wilayah Jombang (Sentra Usaha Kecil Industri Manik-manik, Sentra Usaha Kecil Industri Genteng, Sentra Usaha Kecil Industri Mebel, Sentra Usaha Kecil Industri Cor Kuningan, Sentra Usaha Kecil Dompot)

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang

diteliti. Dalam hal ini peneliti menggali dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Surachmad (1989:163) memberikan pengertian bahwa data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber-sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bidang Koperasi dan PKM
- b. Kepala Seksi Bina Usaha Perkoperasian
- c. Pengusaha kecil di wilayah Jombang (Sentra Usaha Kecil Industri Manik-manik, Sentra Usaha Kecil Industri Genteng, Sentra Usaha Kecil Industri Mebel, Sentra Usaha Kecil Industri Cor Kuningan, Sentra Usaha Kecil Dompot)

Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan artikel-artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Interview, teknik ini sering disebut wawancara, pelaksanaannya dengan mengadakan tanya jawab antara peneliti dengan responden;
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung kegiatan yang terjadi dilapangan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti;
3. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen dalam penelitian sebagai upaya mengumpulkan data adalah :

1. Peneliti sendiri, dimana peneliti yang dapat menangkap setiap fenomena yang terjadi terkait dengan apa yang diteliti;
2. Daftar pedoman wawancara, digunakan sebagai kerangka atau dasar dalam wawancara atau mengajukan pertanyaan dengan nara sumber yang terkait dengan penelitian;
3. Alat-alat tulis, untuk mencatat hasil wawancara serta sewaktu menyaksikan suatu kejadian selama dalam penelitian;

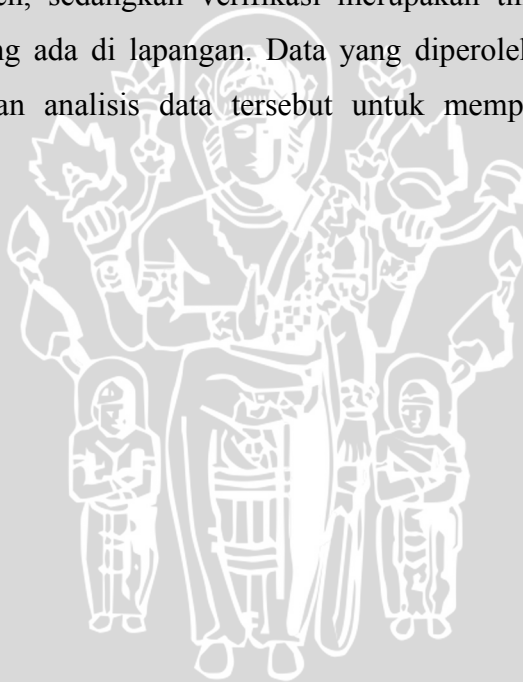
G. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, karena hanya dibatas pada perhitungan prosentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, menguraikan secara sistematis dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penjelasan. Analisa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh dinas terkait dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pengusaha usaha kecil.

Menurut Maleong (2004 : 103) analisis data adalah Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dari suatu uraian dasar. Dalam buku yang sama Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci data secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Data-data yang sudah terkumpul digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dari data tersebut peneliti berusaha untuk menganalisis supaya bisa ditarik kesimpulan. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16) Langkah-langkah untuk memproses dan menganalisis data yakni dengan menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini dimulai sejak awal pengumpulan data sampai pada laporan akhir, merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggandakan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga akhirnya dapat ditarik dan diefisienkan.
2. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dan beberapa tabel yang dirancang untuk menyusun agar dapat dimengerti.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh, sedangkan verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan yang ada di lapangan. Data yang diperoleh sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

a) Gambaran Umum Kabupaten Jombang

1) Aspek Geografis

Di dalam konstelasi wilayah, Kabupaten Jombang terletak pada koridor bagian tengah wilayah propinsi Jawa Timur. Sedangkan dalam konteks kebijakan pengembangan wilayah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VII Kediri dan sekitarnya yang berpusat di Kediri yang diarahkan untuk kegiatan pertanian, industri, perhubungan, perdagangan, pariwisata, pertambangan dan lingkungan hidup.

Secara geografis, Kabupaten Jombang terletak pada koordinat $7^{\circ} 24' 01''$ – $7^{\circ} 45' 01''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 20' 01''$ – $112^{\circ} 30' 01''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Jombang dalah 1.159,50 Km² yang terbagi menjadi 21 Kecamatan, 302 Desa dan 4 Kelurahan. Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Jombang adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri.

Dengan demikian, secara geografis dapat dilihat bahwa Kabupaten Jombang berada pada posisi yang sangat strategis, yaitu tepat berada pada persimpangan jalur lintas Selatan pulau Jawa (Madiun-Surabaya) dan Malang - Tuban.

Kondisi iklim suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan. Wilayah Kabupaten Jombang memiliki tingkat curah hujan yang bervariasi. Pada bulan Nopember sampai Juni dengan curah hujan rata-rata tahunan berkisar 1.621 mm. Dengan demikian berdasarkan klasifikasi *Schmidt*

Fergusson maka wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam tipe iklim B (basah). Sedangkan berdasarkan klasifikasi *Oldeman* yang didasarkan pada jumlah bulan basah dan kering, maka Kabupaten Jombang termasuk ke dalam tipe D 4.

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh sungai besar yang melintasi sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang yaitu Sungai Brantas dan Sungai Konto. Dan sampai saat ini secara umum kebutuhan air bersih maupun air irigasi masih dapat terpenuhi dengan baik, kecuali pada sebagian kecil wilayah di bagian utara Sungai Brantas, yang sering mengalami kesulitan air, utamanya pada musim kemarau.

Kondisi topografi Kabupaten Jombang sebagian besar merupakan dataran dan sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jombang berada pada kisaran 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan $\pm 90 \%$ dari luas wilayah berada pada ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut dan $\pm 10 \%$ berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Selain itu secara topografis Kabupaten Jombang juga dapat dibagi menjadi 3 kesatuan wilayah yaitu :

1. **Wilayah Bagian Selatan** yang berupa daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang;
2. **Wilayah Bagian Tengah** yang didominasi oleh dataran rendah dengan kondisi tanah yang subur dan merupakan wilayah yang terluas;
3. **Wilayah Bagian Utara** (bagian utara Sungai Brantas) yang merupakan daerah perbukitan kapur dengan kondisi tanah yang relatif kurang subur.

Secara geologis, wilayah Kabupaten Jombang didominasi oleh struktur geologi Alluvium ($\pm 48,33 \%$), hasil gunung api kwarter tua ($\pm 22,08 \%$), dan hasil gunung api kwarter muda ($\pm 14,65 \%$). Sedangkan jenis tanah di wilayah Kabupaten Jombang didominasi oleh Regosol Coklat Keabuan, Latosol Coklat Kemerahan dan Alluvial Kelabu. Kondisi ini tidak terlepas dari keberadaan wilayah Kabupaten Jombang yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

Kondisi-kondisi biogeofisik, sangat berpengaruh pada kegiatan penduduk di dalam memanfaatkan lahan yang ada. Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Jombang didominasi oleh sawah, pekarangan, tegalan atau kebun, dan hutan.

2) Aspek Demografis

Dari aspek demografi, jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2002 mencapai 1.126.623 jiwa, terdiri atas 384.708 jiwa atau 34,15 % tinggal di wilayah perkotaan dan 741.915 jiwa atau 65,85 % tinggal di wilayah pedesaan. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Jombang mencapai 972 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Jombang sebesar 3.198 jiwa/km² sedangkan terendah di Kecamatan Plandaan sebesar 381 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk periode 1998-2003 berkisar 0,71 %. Berdasarkan struktur umur, jumlah penduduk di Kabupaten Jombang tersebut didominasi oleh penduduk dengan usia produktif atau usia kerja (20 – 39 tahun) dengan proporsi ± 33 %.

Kondisi kultural keagamaan di Kabupaten juga cukup kompleks, berdasarkan agama, struktur kependudukan di Kabupaten Jombang didominasi oleh pemeluk agama Islam, yaitu ± 98 % dari jumlah penduduk yang ada, sedangkan agama yang lain yaitu Kristen Protestan ± 1,2 %, Katolik ± 0,3 %, Hindu ± 0,06 %, dan Budha ± 0,09 %. Namun demikian dominasi ini tidak menghilangkan identitas kebudayaan umat beragama yang lain, dengan kata lain bahwa kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Jombang dapat terjalin dengan baik dan budaya-budaya umat beragama selain Islam dapat berkembang dengan baik di tengah-tengah lingkungan pondok pesantren dan masyarakat yang beragama Islam.

Kondisi penduduk pada usia sekolah di Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 104,45 % pada tahun 2002. Selain itu angka melek huruf juga semakin mendekati angka 100%, yaitu 99,16% pada tahun 2002. Sedangkan perkembangan angka melek huruf selama lima tahun terakhir sebagaimana tertera pada gambar berikut.

3) Aspek Sosial Budaya

Penduduk Jombang pada umumnya adalah etnik Jawa. Namun demikian, terdapat golongan minoritas etnik Tionghoa dan Arab yang cukup besar. Orang Tionghoa umumnya tinggal di perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan. Terdapat beberapa kawasan di kota Jombang yang dahulunya adalah *Little Chinatown* dan *Little Arab*, meskipun kini tidak lagi eksklusif.

Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa yang diucapkan banyak dipengaruhi oleh Dialek Surabaya yang terkenal kerana sifat egaliterian dan terus terang. Kabupaten Jombang juga merupakan daerah perbatasan antara dua dialek Jawa, iaitu Dialek Surabaya dan Mataram. Beberapa kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kediri dipengaruhi oleh Dialek Mataram yang banyak mempunyai persamaan dengan Bahasa Jawa Pertengahan. Salah satu ciri khas yang membedakan Dialek Surabaya dengan Dialek Mataram adalah penggunaan kata *arek* (sebagai pengganti kata *budak lelaki*) dan kata *cak* (sebagai pengganti kata *emas*).

Agama Islam dianuti oleh 98% penduduk Kabupaten Jombang, diikuti dengan agama Protestan (1.2%); Katolik (0.3%), Buddha (0.09%); Hindu (0.07%), dan lain-lain lagi (0.02%). Jombang juga dikenali sebagai " kota santri " kerana banyaknya sekolah pendidikan Islam (sekolah agama berasrama) terletak di wilayah ini. Kehidupan beragama di Kabupaten Jombang sangat toleran. Kecamatan Mojowarno merupakan kawasan yang mempunyai penganut agama Kristiani, daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran untuk salah satu mazhab Protestan pada zaman Belanda. Agama Hindu juga dianuti oleh sebagian penduduk Jombang, terutamanya di kawasan tenggara (Wonosalam, Bareng, dan Ngoro). Selain itu, Kabupaten Jombang mempunyai dua buah kuil, iaitu Kuil Hok Liong Kiong di Kecamatan Jombang dan Kuil Hong San Kiong di Kecamatan Gudo (dibangun pada tahun 1700).

4) Aspek Ekonomi

Pertanian masih merupakan sektor ekonomi Jombang yang utama, dengan 38.16% PDRB Kabupaten. Meskipun nilai pengeluaran pertanian

mengalami peningkatan, namun sumbangan sektor ini terhadap penggajian mengalami penurunan. Sektor pertanian kini melibatkan 31% daripada jumlah penduduk umur bekerja. Tradisi, kemudahan yang disediakan oleh alam, dan dorongan kerajaan yang baru rupanya menjadikan alasan untuk bertahan. Kesuburan tanah di sini konon dipengaruhi oleh bahan-bahan letusan Gunung Kelud yang terbawa arus deras Sungai Brantas dan Sungai Konto serta sungai-sungai kecil yang lain. Sistem pengairan juga sangat meluas dan memadai, dengan 83% daripadanya merupakan terusan pengairan buatan.

Sekitar 42% daripada tanah di Jombang digunakan untuk persawahan. Letaknya di bagian tengah kabupaten dengan ketinggian 25-100 meter atas aras laut. Lokasi ini ditanam dengan padi serta tanaman kedua seperti jagung, kacang soya, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Tanaman-tanaman makanan utama Kabupaten Jombang pada peringkat provinsi ialah padi, jagung, kacang soya, dan ubi kayu. Pengeluaran padinya yang besar telah menempatkan Jombang sebagai daerah penghasil padi di provinsi Jawa Timur.

Bagian utara Jombang merupakan pusat untuk buah-buahan seperti mangga, pisang, nangka, dan durian belanda. Kecamatan Wonosalam juga merupakan pusat buah-buahan, terutamanya Durian Bido, manakala Kecamatan Perak merupakan penghasil utama jeruk nipis yang diunggulkan kerana kulit yang nipis serta air yang banyak.

5) Visi dan Misi Kabupaten Jombang Tahun 2007

Visi pada hakekatnya adalah suatu gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni dari hasil konsensus bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat tanpa adanya rasa terpaksa. Pada era reformasi dan globalisasi, suatu daerah dipersyaratkan memiliki keunggulan komperatif (*advantages comperative*) maupun kompetitif (*advantages competitive*) serta ketahanan ekonomi yang mantap. Hal ini akan sulit diwujudkan, manakala kondisi masyarakatnya masih berada dalam kondisi “*ketergantungan*” kepada pemerintah. Beranjak dari pemikiran tersebut, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya merubah kondisi masyarakat dari serba ketergantungan menjadi lebih “*mandiri*” dan “*berdaya*”

saing”, mutlak untuk dilakukan. Demikian halnya terhadap perubahan pola pikir aparatur, diperlukan penguasaan terhadap manajemen pemerintahan maupun pembangunan. Dengan demikian semua program dan kegiatan yang dilakukan akan mampu memberikan “*nilai tambah*” dan “*pendapatan bagi daerah*”, dalam rangka menuju “*kemandirian dan daya saing*” yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan akhir dari visi yang kita cita-citakan akan dapat terjangkau.

Berpijak atas dasar kondisi obyektif di atas serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kabupaten Jombang adalah :

“MENUJU JOMBANG YANG AGAMIS, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA TAHUN 2007”

Dalam rumusan visi Kabupaten Jombang terdapat dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan, yaitu mandiri dan berdaya saing. Mandiri menyiratkan adanya kemampuan berdiri di atas kekuatan sendiri dan keunggulan komparatif maupun kompetitif sebagai jembatan untuk dapat mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdaya saing merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan global, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.

Dengan kemandirian dan daya saing yang dimiliki, diharapkan Kabupaten Jombang dapat melaksanakan pembangunan daerahnya dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Kebutuhan dan keinginan Kabupaten Jombang tersebut, khususnya dalam konstelasi wilayah Propinsi Jawa Timur sangat relevan mengingat fungsinya sebagai *buffer zone* atau sabuk hijau dari Satuan Wilayah Pembangunan Gerbang Kertosusila.

Visi tersebut mengisyaratkan adanya suatu proses pembangunan yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Jombang yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Pada akhirnya proses tersebut

diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera, berwawasan global dan bernuansa *agamis sebagai motivasi moral dan etika dalam beraktivitas*.

Sejalan dan untuk menunjang Visi Kabupaten Jombang, Misi Kabupaten Jombang lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

” Memberdayakan potensi daerah yang berbasis sumberdaya lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah dan konsep pembangunan yang berwawaskan lingkungan serta ditunjang dengan profesionalisme aparatur pemerintah dan mobilisasi sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien ”.

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Jombang

1) Fungsi Disperindagkop

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi ;
3. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
4. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
5. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
6. Pelaksanaan pembinaan dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;

7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
8. Pembinaan perijinan, pengendalian dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
9. Pembinaan di bidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
10. Pengelolaan tugas ketata-usahaan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah

2) Tujuan Disperindagkop

Dalam kerangka rencana strategik tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan indikatif dalam rangka merealisasikan misi dan tujuan pembangunan Disperindagkop Kabupaten Jombang secara umum merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

Dengan berlandaskan misi yang ditetapkan, maka Dinas Perindagkop Kabupaten Jombang menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berprestasi, berdedikasi dan mempunyai loyalitas serta tidak tercela
2. Meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan persebaran industri kecil menengah berdaya saing tinggi yang mampu menciptakan kesempatan usaha dan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan keberadaan pasar desa, pasar modern serta legalitas usaha
4. Mewujudkan peranan koperasi, usaha kecil menengah yang tangguh dan mandiri sehingga dapat bersaing untuk menangkap peluang
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
6. Meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha khususnya usaha kecil, menengah dan koperasi

7. Meningkatkan peningkatan SDM di lingkungan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang berkelanjutan
8. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja

3) Tugas Pokok dan Fungsi

1. BAGIAN TATA USAHA

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaiaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaiaan, keuangan dan perlengkapan ;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
6. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

1.1 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
3. Melaksanakan kegiatan adminbistrasi di bidang keuangan dan kepegawaiaan ;
4. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
5. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaiaan yang meliputi : pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-

usulan kenaikan gaji berlaku, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;

6. Melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

1.2 Sub Bagian Penyusunan Program Dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program Dan Pelaporan, mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk penyusunan program ;
2. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
3. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
4. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
5. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan
6. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

2. BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan, sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi dengan penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang perindustrian, mempunyai tugas :

1. Penyusunan, penyiapan bahan kebijakan, petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka serta melaksanakan pembinaan di bidang usaha, produksi dan sarana ;

2. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang industri kimia, sgro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka ;
3. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka ;
4. Penyiapan bimbingan teknis seta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran akibat limbah industri ;
5. Pelaksanaan fasilitasi dibidang industri dan pelaksanaan pengembangan hasil industri unggulan dan promosi menunjang pemasaran ;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1 Seksi Bina Usaha Perindustrian

Seksi Bina Usaha Perindustrian, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan petunjuk teknis dan menyiapkan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang, Industri kimia, agro dan hasil hutan ;
2. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan sarana, usaha dan produksi, serta pengembangan infoemasi dibidang industri kimia, Agro dan Hasil hutan ;
3. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, Hak Atas kekayaan intelektual (HAKI), diversivikasi produk dan inovasi teknologi di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil hutan ;
4. Menyiapkan bahan bangunan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
5. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri Kimia, Agro dan Hasil hutan ;
6. Menyiapkan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran dibidang Industri Kimia, Agro dan Hasil hutan ;
7. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu dibidang Industri kimia, agro dan hasil hutan ;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustriaan.

2.2 Seksi Bina Produksi dan Sarana

Seksi Bina Produksi dan Sarana, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan petunjuk bimbingan teknis dan menyiapkan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri logam, Mesin, elektronika dan Aneka ;
2. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan sarana, usaha dan produksi serta pengembangan informasi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan Aneka ;
3. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, Hak Atas Kekeyaan Intelektual (HAKI), diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan Aneka ;
4. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Kimia, logam dan hasil hutan ;
5. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ,
6. Menyiapkan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
7. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.

3. BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menyiapkan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan kegiatan di bidang penanaman modal serta melakukan urusan kemetrolagian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang perdagangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan ;
2. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan pengembangan usaha dan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen dan ekspor dan impor, perdagangan luar negeri . perdagangan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi ;
3. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan pengkajian Buku Daftar Perusahaan ;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan, penyaluran barang dan jasa ;
5. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dan organisasi profesi ;
6. Pengelolaan standart ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetrolagian lainnya serta pemeriksaan dan pengujian standart tingkat empat untuk alat-alat ukur , takar, timbangan dan perlengkapannya ;
7. Pelaksanaan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
8. Pengawasan dan pengumpulan dan pengolahan data harga sembilan bahan pokok dan setrategis serta monitoring di bidang penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan hal-hal yang berkaitan dengan kemetrolagian serta perlindungan konsumen ;
9. Pelaksanaan bim bimbingan teknis kepada pengusaha da reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1 Seksi Perdagangan

Seksi Perdagangan, mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan, perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha ;
2. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan bidang

usaha dibidang pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan ;

3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan ekspor, impor dan kegiatan perdagangan luar negeri, perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha ;
4. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi usaha dibidang pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan strategis ;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan.

3.2 Seksi Bina Usaha Perdagangan

Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai fungsi :

1. Melakukan pembinaan usaha dan sarana perdagangan, perijinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha ;
2. Melakukan pembinaan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang penertiban pergudangan dan tempat usaha ;
3. Memantau, mengevaluasi dan menyajikan data peredaran barang-barang elektronik dan barang dalam keadaan terbungkus ;
4. Melakukan pembinaan bimbingan teknis dibidang promosi atau pameran di dalam dan luar negeri ;
5. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam mengembangkan informasi dibidang perdagangan ;
6. Mengelola standart ukuran massa, memeriksa dan menguji standart ukuran panjang, menara dan menara ulang serta mengumpulkan dan mengolah data ukuran, arus, massa dan timbangan ;
7. Mengelola standart ukuran panjang, memeriksa dan menguji standart ukuran panjang, menara dan menara ulang serta mengumpulkan dan mengolah data dan ukuran, arus, panjang dan volume ;
8. Melakukan penyuluhan kemetrolagian, pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbangan, perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus. Melakukan penyelidikan terhadap tersangka pelaku tindak

pidana Undang-Undang Metrologi Legal, melakukan ukur ulang, megolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka rangka perlindungan konsumen ;

9. Mengelola cap tanda tera dan sarana kemetrolagian ;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

4. BIDANG KOPERASI DAN PKM

Bidang koperasi dan PKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam penyiapan, pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pembinaan perkoperasian serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Koperasi dan PKM, mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
2. Penyusunan pedoman tentang kelembagaan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam
3. Pembinaan, pengawasan, pengendalian koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
4. Pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan latihan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1 Seksi perkoperasian dan PKM

Seksi Perkoperasian dan PKM, mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengumpulan, penyiapan pengelolaan data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana san program pembangunan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
2. Melaksanakan pengembangan organisasi ketatalaksanaan penyuluhan dan klasifikasi koperasi ;

3. Melaksanakan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan Badan Hukum dan pengembangan organisasi koperasi ;
4. Melaksanakan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi ;
5. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang program pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
6. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan koperasi dan PKM ;
7. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan koperasi dan PKM ;
8. Melaksanakan dan fasilitasi pengembangan koperasi ;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang koperasi dan PKM.

4.2 Seksi Bina Usaha Perkoperasian

Seksi Bina Usaha Perkoperasian, mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan pembinaan dan pedoman dalam keuangan ;
2. Melaksanakan pengembangan di bidang usaha simpan pinjam, lembaga keuangan masyarakat dan koperasi bank perkreditan rakyat ;
3. Membina, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan masyarakat ;
4. Menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa fasilitasi penjaminan koperasi ;
5. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama koperasi dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dalam mengembangkan informasi bisnis koperasi ;
7. Melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen koperasi ;
8. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi ;
9. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan usaha koperasi ;

10. Melaksanakan dan fasilitasi pengembangan usaha koperasi ;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Koperasi dan PKM

4) SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi didukung oleh sumber daya manusia yang berpotensi sebagai berikut :

1. JUMLAH PNS DISPERINDAGKOP KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2007

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	Prosentase
1	Laki-laki (L)	38	67, 8 %
2	Perempuan (P)	18	32, 2 %
	Jumlah	56	100 %

Sumber : Disperindagkop

Dari data diatas, menunjukkan bahwa sekitar 38 orang atau (67, 80 %) pegawai Disperindagkop berjenis laki-laki, sedangkan 18 orang atau (32, 20 %) berjenis perempuan.

2. JUMLAH PNS DISPERINDAGKOP KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN GOLONGAN RUANG TAHUN 2007

NO	GOLONGAN RUANG	a	b	c	d	e	JUMLAH
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-
2	Golongan II	1	2	1	2	-	6
3	Golongan III	8	28	2	9	-	47
3	Golongan IV	2	1	-	-	-	3
	JUMLAH	11	31	3	11	-	56
	Prosentase	19,64 %	55,37 %	5,35 %	19, 66 %	0, 0 %	100 %

Sumber : Disperindagkop

3. JUMLAH PNS DISPERINDAGKOP KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2007

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah	Prosentase
1	Sekolah Dasar (SD)	-	0, 00 %
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1	1,70 %
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	30	53, 57 %
4	D 3	6	10, 71 %
4	S 1	13	23, 21 %
4	S 2	6	10, 72 %
	Jumlah	56	100 %

Sumber : Disperindagkop

Dari data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Disperindagkop berpendidikan SMA dengan jumlah 30 orang atau 53, 57 %, sedangkan yang berpendidikan S 1 berjumlah 13 orang atau 23 %, berpendidikan

D 3 berjumlah 6 orang atau 10, 72 %, berpendidikan S 2 berjumlah 6 orang atau 10, 72 % dan lainnya berpendidikan SLTP berjumlah 1 orang atau 1, 70 orang.

4. JUMLAH PNS DISPERINDAGKOP KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN USIA TAHUN 2007

NO	USIA (TAHUN)	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	18-25	-	-	-	-	-
2	26-30	-	1	-	-	1
3	31-35	-	1	-	-	1
4	36-40	-	2	6	-	8
5	41-45	-	-	17	-	17
6	46-50	-	-	17	1	18
7	51-56	-	2	7	2	11
8	56 Ke atas	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	6	47	3	56

Sumber : Disperindagkop

5. JUMLAH PNS DISPERINDAGKOP KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN DISTRIBUSI UNIT KERJA TAHUN 2007

NO	UNIT KERJA	JUMLAH									
		ESELON					GOLONGAN				
		II	III	IV	STAF	JML	IV	III	II	I	JM L
1	PERINDAGKOP	1	4	8	43	56	3	47	6	-	56

Sumber : Disperindagkop

5) Arah dan Kebijakan Disperindagkop

Yang dimaksud kebijakan dalam hal ini adalah keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan stakeholders dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang diarahkan pada :

1. Pengoptimalan fungsi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang ada
2. Pengembangan IKM yang tangguh dan mandiri melalui penguasaan teknologi pengembangan SDM, Pelestarian lingkungan serta pelayanan yang prima
3. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pasar desa serta sosialisasi perijinan kepada seluruh masyarakat
4. Menciptakan iklim koperasi , usaha kecil dan Menengah yang kondusif.

6) Visi dan Misi Disperindagkop

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan dan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah sesuatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa datang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Berdasarkan maksud dari visi tersebut maka dari itu Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang tahun 2007 adalah sebagai berikut :

“ Pengembangan usaha industri, Perdagangan dan Koperasi kuat, tangguh, modern serta mempunyai daya saing tahun 2008 ”.

Untuk mewujudkan suatu visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu maka sesuai dengan visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada ditetapkan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi Kabupaten Jombang tahun 2007 yang akan memberikan arah

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan budaya disiplin aparatur untuk meningkatkan pelayanan prima
2. Menciptakan perluasan lapangan kerja melalui penciptaan pengembangan lapangan berusaha
3. Membangun perdagangan yang tangguh, jujur, etis untuk kelancaran distribusi bahan pokok dan produk-produk bahan ekspor
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang terpadu.

c) Gambaran Umum Usaha Kecil Kabupaten Jombang

Tabel I
Jumlah Populasi Sentra Usaha Kecil

No	Unit Usaha	Jumlah Populasi
1	Mebel	60
2	Manik-manik	45
3	Genteng	33
4	Dompot	27
5	Cor kuningan	20

2. Data Fokus Penelitian

a) Upaya Pemberdayaan Industri Kecil di Kabupaten Jombang yang meliputi :

1) Bidang SDM

Faktor manusia merupakan faktor strategis dan fundamental dalam eksistensi industri kecil karena SDM adalah nahkoda utama keberlangsungan usaha. Selama ini, sebagian besar SDM industri kecil merupakan SDM yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan, kemampuan/skill dalam hal manajemen produksi, manajemen keuangan, maupun dalam hal manajemen pemasarannya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab usaha kecil sulit berkembang dengan baik, dan selalu terjebak pada permasalahan yang selalu sama.

Dalam pasal 17 UU No. 9 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan dalam bidang SDM dapat ditempuh melalui :

1. Memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan
2. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi
4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi (Anoraga dan Sudantoko, 2002: 335)

Melihat arti penting dari keberadaan SDM, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang menyusun program pembinaan dalam aspek SDM dengan berbagai program kegiatan, meliputi :

1. Pembentukan dan mengaktifkan kelompok kerja usaha kecil yang sejenis meliputi aspek-aspek SDM, pengadaan bahan baku, proses produksi dan pemasaran
2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bidang manajerial dan teknis kegiatan usaha ekonomi produktif melalui pelatihan dan kursus-kursus
3. Mengubah wawasan kewiraswastaan dari orientasi jangka pendek ke jangka panjang dalam ruang lingkup kelangsungan usaha dan kualitas produksi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif melalui pelatihan dan pembinaan yang kontinyu

4. Memperluas cakrawala pengusaha kecil dalam mengelola usahanya melalui studi komparasi, magang kerja di berbagai tempat terkait dan relevan dengan usahanya
5. Memperluas kesempatan pengusaha kecil dalam memperoleh pelatihan dan kursus-kursus manajemen usaha dan teknologi dalam usahanya
6. Menyelenggarakan dan mengaktifkan lembaga pelayanan informasi dan konsultasi manajemen usaha kecil

Dari hasil wawancara dengan bapak Suparlan, Kasubdin Koperasi mengatakan :

“Untuk meningkatkan SDM salah satu yang ditempuh oleh Disperindagkop Kabupaten Jombang adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, adanya diklat karena permintaan dari pengusaha sendiri, biasanya diklat yang dilakukan adalah diklat manajemen karena permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil adalah kelemahan dalam mengelola usaha, baik pada waktu proses produksi maupun pada saat memasarkan hasil industri. Materi yang telah diberikan meliputi pelatihan manajemen produksi, manajemen usaha, manajemen pemasaran . Selain itu Disperindagkop mengadakan magang kerja untuk memperluas cakrawala pengusaha dalam mengelola usahanya “. (wawancara, hari Selasa, tgl 16 Maret 2008)

Berikut ini, beberapa pelatihan pembinaan SDM yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terhadap usaha kecil selama tahun 2007 :

Tabel 2
Pembinaan SDM

No	Bentuk Kegiatan
1	Bintek akuntansi bagi pengurus, pengawas / juru buku dan pengelola UKM se- Jombang
2	Penambangan wawasan bahan baku bagi industri kecil Manik-manik kaca Desa Plumbon gambang kecamatan Gudo
3	Pelatihan Perpaduan warna bagi Industri kecil manik-manik
4	Pelatihan diversifikasi dan finising produk usaha kecil dompet

Sumber : Disperindagkop, 2007

Selanjutnya, menurut bapak Ahmad, salah satu pengusaha Manik-manik mengatakan :

“Saya pernah mengikuti semacam diklat yang dilakukan oleh Disperindagkop dimana materi yang diberikan adalah semacam perbaikan proses produksi dan pengetahuan tentang pasar dan persaingan “ (wawancara, hari rabu, tgl 17 maret 2008)

Selain itu, hal ini diperkuat dari pernyataan bapak Subakri, pengusaha kecil genteng mengatakan :

“ Iya mas, tahun lalu saya pernah mengikuti magang kerja ke Trenggalek untuk melihat sentra usaha genteng, alhamdulillah saya dapat pengalaman berharga dari sana “. (wawancara, hari rabu, tanggal 17 maret 2008).

2) Bidang Teknologi

Berbeda dengan negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama/ tradisional dalam bentuk mesin tua atau alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya kualitas produk yang dibuat. Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam proses produksi. Rendahnya penguasaan teknologi modern merupakan ancaman serius bagi kesanggupan UKM Indonesia untuk bersaing di dalam era pasar bebas nantinya. Faktor teknologi dan SDM lebih penting dari pada faktor SDA. Dengan perkataan lain, dua faktor keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia atau UKM pada khususnya selama ini, yaitu ketersediaan berbagai ragam bahan baku dalam jumlah yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah akan semakin tidak penting di masa mendatang, diganti oleh dua faktor keunggulan kompetitif tersebut (teknologi dan SDM).

Melihat permasalahan diatas, Disperindagkop Kabupaten Jombang melakukan program sebagai berikut :

1. Pengadaan dan pelatihan (diklat) tentang penguasaan teknologi yang berbasis pada usaha kecil

2. Pengadaan bimbingan dan konsultasi teknologi terhadap usaha kecil secara terpadu
3. Pengadaan klinik teknologi dan manajemen usaha kecil

Hal ini, disampaikan oleh Bapak Suparlan, Kasubdin Koperasi :

” Dinas Perindagkop telah melakukan program tentang pembinaan teknologi diantaranya pelatihan tentang teknologi tepat guna,. Memfasilitasi uji laboratorium produk industri kecil genteng dan sosialisasi penggunaan bahan bakar batu bara ”. (wawancara, hari Selasa, tanggal 16 maret 2008, di kantor Disperindagkop).

Berikut ini, beberapa pelatihan pembinaan bidang teknologi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terhadap usaha kecil selama tahun 2007 :

Tabel 3
Pembinaan Teknologi

No	Bentuk Kegiatan
1	Sosialisasi Penggunaan Bahan bakar batubara industri kecil genteng
2	Fasilitasi uji laboratorium produk industri kecil genteng dan HAKI

Sumber : Disperindagkop, 2007

Hal ini diperkuat oleh Bapak sulthon, pengusaha genteng mengatakan :

” saya pernah diberi pelatihan tentang pelatihan teknologi tepat guna dan difasilitasi uji laboratorium produk genteng saya ”. (wawancara, hari Kamis, 18 april 2008, di tokonya).

3) Bidang Permodalan

Modal merupakan salah satu faktor yang paling dibutuhkan dalam suatu kegiatan operasi usaha. Kekurangan modal dapat menjadi penghambat perkembangan industri kecil karena suatu perusahaan dalam menjalankan atau memulai operasi usahanya selalu membutuhkan modal. Oleh karena itu masalah permodalan harus mendapatkan perhatian yang khusus baik dari Pemerintah maupun dari pengusahanya sendiri. Dalam pasal 21 UU No. 9 tahun 1995

tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan industri kecil dalam bidang pembiayaan yaitu dengan :

1. Kredit Perbankan
2. Pinjaman Lembaga Keuangan bukan bank
3. Modal ventura
4. Pinjaman dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN)
5. Hibah
6. Jenis Pembiayaan lainnya (Anoraga dan Sudantoko 2002 :3336)

Modal merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap berkembangnya suatu usaha. Dengan tersedianya modal yang cukup dapat menjadai pendorong untuk meningkatkan produksi, yang pada akhirnya juga menentukan maju tidaknya suatu usaha.

Oleh kerana itu strategi yang dilakukan Disperindagkop Kabupaten Jombang untuk meningkatkan usaha kecil adalah melalui pembinaan terhadap permodalan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah berupa memberikan informasi bantuan modal atau kredit dari lembaga-lembaga keuangan, baik itu bank maupun nonbank seperti koperasi . informasi bantuan ini juga meliputi pemberian konsultasi tentang pengajuan proposal. Hal ini didukung pernyataan dari bapak Suparlan, selaku Kasubdin Koperasi, sebagai berikut :

“ Untuk membantu pengusaha kecil dalam permodalan, pihak Disperindagkop memberikan informasi kepada pengusaha kecil terhadap lembaga-lembaga keuangan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan modal. Selain itu juga memberikan petunjuk atau pengarahan tentang bagaimana pengajuan proposal yang baik untuk mendapatkan modal dari pihak seperti lembaga-lembaga keuangan tersebut (wawancara hari Selasa, tanggal 16 maret 2008, di kantor Disperindagkop Jombang).

Selama kurun waktu tahun 2007, dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 1.650.000.000 melalui dana Revolving. Pengusaha kecil yang telah mengajukan kredit sebesar 83 orang, namun yang telah mendapatkan sebesar 60 orang.

Tabel 4

Daftar UKM yang telah mendapat kredit tahun 2007

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat
1	Sutoyo	Cor kuningan	Mojotrisno, Mojoagung
2	Iswahyono	Cor kuningan	Mojotrisno, Mojoagung
3	Bambang Sutikno	Cor kuningan	Mojotrisno, Mojoagung
4	Ahmad Su'ud	Mebel	Catakgayam, Mojowarno
5	Santoso	Mebel	Catakgayam, Mojowarno
6	Solikhin mahmud	Mebel	Catakgayam, Mojowarno
7	Sulthoniah	Mebel	Catakgayam, Mojowarno
8	Nanik Suharti	Mebel	Catakgayam, Mojowarno
9	Nurwiyah	Mebel	Catakgayam, Mojowarno
10	Ahmad	Manik-manik	Gambang, Gudo
11	Sugiyo	Manik-manik	Gambang, Gudo
12	Kasiono	Manik-manik	Gambang, Gudo
13	Abd. Rohman	Manik-manik	Gambang, Gudo
14	Waget Riyanto	Manik-manik	Gambang, Gudo
15	Nurwahid	Manik-manik	Gambang, Gudo
16	Muslimin	Pande Besi	Janti, Jogoroto
17	Sukrisno	Pande Besi	Janti, Jogoroto
18	Musta'in	Pande Besi	Janti, Jogoroto
19	H.Suyadi	Pande Besi	Janti, Jogoroto
20	M. Ali	Pande Besi	Janti, Jogoroto
21	Arifin	Dompot	Rejoslamet, Mojowarno
22	Yulianto	Dompot	Rejoslamet, Mojowarno
23	Maksum	Dompot	Rejoslamet, Mojowarno
24	Sutisno	Dompot	Rejoslamet, Mojowarno
25	Wusono adi	Dompot	Rejoslamet, Mojowarno
26	Subakri	Genteng	Gedangan, Mojowaarno
27	Sulthon	Genteng	Gedangan, Mojowaarno
28	Akhmad Tokhal	Genteng	Gedangan, Mojowaarno

29	Aminun	Tempe Basah	Pandanwangi, Diwek
30	Hanif Musthofa	Tempe Basah	Pandanwangi, Diwek
31	Sutrisno	Tempe Basah	Pandanwangi, Diwek
32	Sukarno	Anyaman Bambu	Segodorejo, Sumobito
33	Seger	Anyaman Bambu	Segodorejo, Sumobito
34	Slamet	Anyaman Bambu	Segodorejo, Sumobito
35	Ahyar	Pengrajin Gibs	Banjordowo, Jombang
36	Ramelan	Pengrajin Gibs	Banjordowo, Jombang
37	Basyurianto	Pengrajin Gibs	Banjordowo, Jombang
38	A.Khusen	Budidaya Jeruk Nipis	Bandar Kedung mulya
40	Suparjo	Budidaya Jeruk Nipis	Bandar Kedung mulya
41	Rahmawati	Budidaya Jeruk Nipis	Bandar Kedung mulya
42	H. M. Muhdlor	Budidaya Salak	Pulogedang, Tembelang
43	H.M.Bisri	Budidaya Salak	Ponen, Tembelang
44	Sunarti	Budidaya Salak	Sentul, Tembelang
45	Sholeh	Budidaya Salak	Bedahlawak, Tembelang
46	M.Anwar	Budidaya Mujaer	Rejoagung, Ngoro
47	Mubarok	Budidaya Mujaer	Rejoagung, Ngoro
48	H.M.Machin	Budidaya Lele	
49	Sugeng Pribadi	Budidaya Lele	Jogoroto
50	Sobirin	Budidaya Lele	Jogoroto
51	Lilik	Pedagang Buah	Samping Stadion
52	Fauzi	Pedagang Buah	Samping Stadion
53	M.Hariyanto	Pengepul lele	Jogoroto
54	H. Masrukhan	Pengepul lele	Jogororoto
55	Ny. Roimah	Huller Keliling	Jl. Raya Gudo, Gudo
56	Maksum	Huller Keliling	Segodorejo, Sumobito
57	Tommy Y	Bengkel	Jl. Wahid Hasyim No.51
58	Suyatno	Bengkel	Bandung, Diwek
59	Dwi Rahadi	Angkutan Pedesaan	Ceweng, Diwek
60	Bambang	Angkutan Pedesaan	Jogoroto

Sumber : Disperindagkop, 2007

Menurut penuturan Bapak Ja'far , Kepala Disperindagkop mengatakan :

” sebagian besar pengusaha kecil yang tidak mendapatkan pinjaman modal karena keterbatasan modal yang dikucurkan sehingga Disperindagkop menyeleksi pemohon secara ketat kepada siapa saja yang layak mendapatkannya” (wawancara hari rabu tanggal 18 april 2008)

Namun dalam kenyataannya pembinaan permodalan yang dilakukan Disperindagkop tidak pernah mendapat respon yang antusias dari sebagian besar pengusaha kecil, ini disebabkan karena pengusaha merasa pesimistis untuk mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan yang ada, karena mereka tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan modal tersebut dan masih banyaknya pengusaha yang belum memiliki legalitas usahanya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bambang Sutikno, sebagai pengusaha kecil Cor Kuningan mengatakan :

“ Selama ini saya membuka usaha mendirikan usaha ini, modal yang saya dapat berasal dari uang pribadi saya sendiri, untuk melakukan pinjaman kepada bank saya sendiri belum berani karena saya tidak mempunyai jaminan ”. (wawancara hari Kamis, tanggal 18 Maret 2008, pukul 11.00)

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan bapak Sulthon, pengusaha genteng :

“ Pertamanya saya mendirikan usaha ini dengan memakai modal sendiri 70 % dan setelah usaha saya berkembang mulailah saya meminjam modal kepada koperasi dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah (akte), saya memilih koperasi dari pada bank karena prosesnya lebih cepat hanya dalam waktu 1 jam saja bisa cair walaupun bunganya sangat tinggi “. (wawancara hari Kamis, tanggal 18 Maret, pukul 12)

Di bawah ini tabel, sumber modal yang di peroleh dari para pengusaha kecil :

Tabel 5
Sumber Modal Pengusaha Kecil

No	Jenis Usaha	Respon den	Sumber Modal Kerja				
			1	2	3	4	5
1	Cor Kuningan	3	3				
2	Mebel	9	5			1	3
3	Manik-manik	7	2	1		2	2
4	Dompot	4	2		1		1
5	Genteng	5	3		1		1
Jumlah		28	15	1	2	3	7
Prosentase %		100	53,58	3,57 %	7,14 %	10 %	25 %

Sumber : Data Primer, diolah (2008)

Keterangan :

1. Tabungan sendiri
2. Pinjaman dari keluarga
3. Pinjaman dari teman
4. Pinjaman dari bank
5. Pinjaman dari Koperasi

Dari 28 orang responden yang diteliti, menunjukkan bahwa sebagian besar sumber modal pengusaha kecil dari tabungan sendiri sebanyak 15 orang responden atau 53,58 %, sedangkan dari pinjaman koperasi sebanyak 7 orang responden atau 25 %, selanjutnya dari pinjaman dari bank sebanyak 3 orang responden atau 10 %, selanjutnya dari pinjaman dari teman sebanyak 2 orang responden atau 7,14 % dan dari pinjaman keluarga sebanyak 1 responden atau 3,57 %. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden pengusaha kecil menggunakan tabungan atau modal pribadi dalam menjalankan usahanya.

4) Bidang Pemasaran

Masalah pemasaran merupakan kunci utama dalam pengembangan usaha, untuk itu adanya pembinaan dalam hal ini dapat mendorong dan mendukung kegiatan pemasaran produk industri kecil untuk pasar ekspor, pasar regional dan pasar lokal serta menyampaikan informasi tentang adanya peluang pasar kepada para pengusaha kecil.

Adapun program yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Jombang antara lain :

- a. Pelatihan bagi pengusaha kecil tentang *grading, branding dan packaging Product*
- b. Pelatihan bagi pengusaha kecil bidang distribusi barang dan penjualan
- c. Penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah
- d. Pembentukan sistem informasi pasar antar wilayah sentra usaha kecil
- e. Pengembangan jasa sarana transportasi dan distribusi
- f. Pelatihan untuk pengusaha kecil tentang prosedur dan teknik impor

Hal ini dinyatakan oleh bapak Suparlan, selaku Kasubdin Koperasi mengatakan :

“ Salah satu program yang dilakukan Disperindagkop dalam pemasaran adalah dengan melakukan pelatihan tentang *grading, branding dan packaging product* . Selain itu, jika ada pameran yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Jombang, Disperindagkop mengambil peran dengan memamerkan produk unggulan yang menjadi binaan instansi kami, dengan menyediakan stan-stan produksi industri kecil dan kerajinan dengan harga yang lebih murah dan bahkan penyediaan stan gratis tanpa dipungut biaya “(wawancara hari selasa, tanggal 15 maret 2008).

Usaha yang dilakukan Disperindagkop di harapkan mampu memberikan dampak positif terhadap jangkauan pemasaran yang dilalui oleh industri kecil yang ada di Jombang. Pemasaran industri tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Jombang saja tetapi juga mencakup pasar nasional maupun internasional.

Untuk mengetahui jangkauan pemasaran produk industri kecil dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6

Jangkauan Pasar Produk Usaha kecil Kabupaten Jombang

No	Jenis Usaha	Respon den	Pasar Yang Dilayani			
			Lokal	Region al	Nasional	Internasional
1	Cor Kuningan	3			2 (1)	1 (1)
2	Mebel	9	6 (1)	1 (1)	2 (2)	
3	Manik-manik	7		4 (1)	1 (3)	2 (3)
4	Dompot	4	1 (1)	2 (3)	1 (5)	
5	Genteng	5	2	3 (4)		
Jumlah		28	9	10	6	3
Porsentase		100	32, 14	35, 72	21, 42	10,72

Sumber : Data Primer, diolah (2008)

Keterangan :

Regional Jawa Timur :

1. Surabaya, Madiun, Kediri, Tulungagung
2. Kediri, Surabaya, Nganjuk
3. Surabaya
4. Mojokerto, Surabaya, Nganjuk

Nasional :

1. Denpasar, Solo, Yogyakarta, Semarang
2. Denpasar, Jakarta, Irian Jaya
3. Denpasar, Jakarta, Yogyakarta, Samarinda
4. Denpasar
5. Solo

Internasional :

1. Jepang, Belanda, Australia, Amerika, Denmark, Itali, Kanada
2. Korea, Jepang, Spanyol
3. New Zealand, Perancis, Jerman, Amerika, Jepang

Dari 28 orang responden yang diteliti, 10 orang responden atau 35,72 % jangkauan pemasarannya regional, 9 orang responden atau 32, 14 % jangkauan pemasarannya local, selanjutnya 6 orang responden atau 21, 42 % jangkauan pemasarannya sampai nasional dan 3 orang responden atau 10, 72 % jangkauan pemasannya hingga internasional.

5) Bidang Administrasi Usaha

Manajemen usaha atau cara pengelolaan suatu usaha yang selalu dianggap penting adalah bertalian dengan pola atau sistem manajemen, proses dan fungsi manajemen, aspek pengorganisasian, aspek administrasi secara menyeluruh dan aspek sumber daya manusia (tenaga kerja). Pada umumnya cara pengelolaan usaha dilakukan langsung oleh pemilik usaha, dimana faktor inilah yang menyebabkan tidak dimilikinya format menejemen dan adminstrasi yang baik. Manajemen usaha yang sederhana dan kerap bercampur baur dengan manajemen rumah tangga.

Pola manajemen usaha yang diterapkan relatif sederhana dan tradisional, sesuai dengan skala usaha yang relatif kecil. Sebagian besar pengusaha kecil dikelola oleh pemilik sendiri tanpa campur tangan pemerintah, sedangkan pengorganisasian usaha yang belum begitu rumit, sehingga banyak fungsi atau tugas-tugas yang dirangkap oleh satu orang dalam satu jabatan, misalnua fungsi administrasi, keuangan dan personalia.

Namun dalam penyelenggaraan usaha di bidang produksi, nampaknya adanya perpaduan tradisional dan modern. Pada manajemen produksi, masing-masing pengusaha sudah memiliki kualitas dan keahlian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pengusaha. Kualitas, keahlian dan produktivitas yang dimiliki pengusaha kecil tersebut berbeda-beda, sehingga dalam hal ini pemilik usaha yang sudah mengenal dan menerapkan secara langsung pada sistem pemberian upah. Manajemen usaha masih menggunakan sistem kekeluargaan atau kekerabatan, sehingga pemilik usaha merekrut tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri namun disamping itu juga sebagian merekrut tenaga kerja dari luar keluarganya. Selanjutnya pemilik usaha dalam fungsi administrasi belum bisa membedakan secara jelas antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan

keluarga. Hal ini dapat diamati dari pengusaha yang tidak dapat membedakan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Dan kebanyakan pengusaha tidak mempunyai pembukuan atau laporan keuangan.

Melihat permasalahan diatas, Disperindagkop Kabupaten Jombang melakukan program, meliputi antara lain :

1. Pelatihan bagi pengusaha kecil tentang administrasi perusahaan terapan
2. Pelatihan tentang manajemen keuangan terapan bagi pengusaha kecil
3. Pelatihan untuk pengusaha kecil tentang pembuatan usulan pengembangan usaha

Hal ini diungkapkan oleh bapak Suparlan, selaku Kasubdin Koperasi :

” salah satu permasalahan sebagian besar pengusaha kecil adalah carut marutnya manajemen usahanya, untuk itu Disperindagkop melakukan program pelatihan bagi pengusaha kecil tentang administrasi usaha, manajemen keuangannya, namun demikian sampai saat ini sangat sulit merubah kebiasaan pengusaha ”. Wawancara hari selasa, tanggal 16 maret 2008, di kantor Disperindagkop).

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nanik, pengusaha mebel :

“ Kalau masalah keuangan saya ini nggak pernah pakai pembukuan maupun laporan keuangan, maklum saya inikan lulusan SD jadi gak negerti gitu-gitu an, yang penting bisa buat bayar gaji pegawai dan memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah cukup. Disamping itu kalau pakai pembukuan repot, antara uang usaha dan uang buat kepentingan keluarga sama “ (wawancara, hari rabu, tanggal 16 maret 2008)

Berikut ini, beberapa pelatihan pembinaan Administrasi Usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terhadap usaha kecil selama tahun 2007 :

Tabel 7
Pembinaan Administrasi Usaha

No	Bentuk Kegiatan
1	Pelatihan akuntansi perusahaan bagi industri kecil cor kuningan
2	Pelatihan manajemen keuangan usaha kecil se-kabupaten Jombang

Sumber : Disperindagkop, 2007

b) Respon Pengusaha Kecil terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang

Setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bermuara pada kepentingan pengusaha kecil. Oleh karena itu program yang telah dilakukan tak lepas dari penilaian dan respon pengusaha kecil.

Pada umumnya pengusaha kecil mempunyai latar pendidikan yang tidak terlalu tinggi, sehingga berpengaruh pada daya tangkap akan program-program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini juga menyebabkan tujuan pemberdayaan yang ditargetkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tidak dapat tercapai secara optimal.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparlan, Kasubdin Koperasi mengungkapkan :

” biasanya para pengusaha kecil mempunyai pendidikan yang rendah , hal tersebut berpengaruh terhadap daya tangkap terhadap materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan dan diklat yang kami lakukan ” (wawancara, hari rabu, tanggal 16 maret 2008)

Bapak sulthon, pengusaha kecil Mebel juga menyatakan bahwa :

” para pekerja saya rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi, yang tertinggi hanya lulusan SMA, sebagian besar lulusan SD. Biasanya mereka itu saya tempatkan di bagian yang lebih mengutamakan tenaga ketimbang ketrampilan. Seperti misalnya pada bagian penggergajian.pada bagian ini ketrampilan memang dibutuhkan tapi biasanya mereka mendapatkan keahlian menggergaji bukan berasal dari pendidikan formal melainkan dari pengalaman orang-orang yang telah berpengalaman ”. (wawancara, hari rabu, tanggal 16 maret 2008)

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki pengusaha kecil juga berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hubungan dengan pihak luar, sehingga akses informasi sangat minim. Terkadang mereka kurang merespon kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh Dinas karena beranggapan kegiatan tersebut tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang mereka jalankan.

Pengusaha kecil pada umumnya berharap banyak pada bantuan secara langsung dari pada pembinaan ataupun pelatihan yang ada.

Adapun bantuan yang diharapkan oleh pengusaha kecil antara lain :

Tabel 8
Bantuan yang Diharapkan

No	Jenis Usaha	Respon den	Bantuan Yang diharapkan						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Mebel	9	1				3		5
2	Manik-Manik	7	2				1		4
3	Genteng	5			2		3		
4	Dompot	4	1				1		2
5	Cor Kuningan	3				2		1	
Jumlah		28	4	-	2	2	8	1	11
%		100	14,28	0	7,14	7,14	28,58	3,58	39,28

Keterangan :

1. Modal
2. Peralatan Produksi
3. Pemasaran
4. Modal, Peralatan Produksi
5. Modal, Pemasaran
6. Peralatan Produksi , Pemasaran
7. Modal, Peralatan Produksi, Pemasaran

Dari data diatas, menunjukkan bahwa bahwa bantuan yang diharapkan oleh pengusaha kecil sebagian besar sekitar 11 orang atau 39, 28 % mengharapkan bantuan Modal, Peralatan Produksi dan Pemasaran, sekitar 8 orang atau 28, 58 % mengharapkan bantuan Modal dan Pemasaran, 4 orang atau 14, 28 % mengharapkan bantuanModal, 2 orang atau 7, 14 % mengharapkan Modal dan Peralatan produksi, 2 orang atau 7, 14 % mengharapkan bantuan Pemasaran.

c) Kendala dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang

1. Kendala Kedinasan

Dalam melakukan pemberdayaan , keberadaan pembina teknis yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program ini. Kendala-kendala yang dihadapi adalah berupa :

- a. Jumlah pembina teknis yang ada tidak seperti yang diharapkan atau kurang sedangkan jumlah usaha kecil sangat banyak
- b. Tidak adanya penataan dalam organisasi yang jelas daalam struktur dinas

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suparlan, Suparlan, selaku Kasubdin Koperasi :

“ kendala yang cukup serius yang kami hadapi selama ini adalah minimnya jumlah tenaga teknis yang ada. Kalaupun ada, rata-rata ketrampilannya belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan “
(wawancara 17 maret 2008 pukul 14.00)

Disamping masalah sumber daya aparatur yang belum memadai, kendala lain yang dihadapi adalah masalah pendanaan, dana yang digunakan untuk kegiatan operasional seperti pengadaan diklat belum mencukupi. Minimnya anggaran untuk pembinaan dan pengembangan menyebabkan kurang optimalnya tindakan pemberdayaan yang dilakukan selama ini.

Bapak Suparlan, selaku Kasubdin Koperasi menjelaskan bahwa :

” keterbatasan dana menyebabkan pemberdayaan yang kami lakukan selama ini kurang maksimal. Tidak tiap tahun pembeedayaan ini bisa dilakukan karena kami juga melakukan pemberdayaan sektor usaha kecil lain ” (wawancara 16 maret 2008 pukul 14.00)

2. Kendala Pengusaha Kecil

a. Kualitas SDM pengusaha yang lemah

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun . keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit mengadopsi perkembangan teknologi

baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Sebagian besar pengusaha kecil tingkat pendidikannya rendah. Hal ini sesuai dengan pengakuan oleh Sugiyo, pengusaha kecil Manik-manik mengatakan :

” saya ini hanya lulusan SD mas, jadi ya terbatas kemampuan saya, bagi saya yang penting saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya dan bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai lulus perguruan tinggi ”.
(wawancara hari Kamis, tanggal 18 Maret 2008)

b. Permodalan

Setiap membuka usaha pengusaha industri kecil membutuhkan modal yang tidak sedikit. karena modal merupakan faktor yang cukup untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu pengusaha industri kecil mengalami hambatan terutama untuk pembelian bahan baku serta kebutuhan untuk membeli peralatan lainnya. Namun selama ini para pengusaha selalu dihadapkan pada modal yang cukup terbatas.

Permasalahan modal merupakan salah satu permasalahan yang cukup klasik, karena selama ini pengusaha kesulitan untuk mencari tambahan modal usahanya. Untuk pinjaman pada bank, pengusaha ini masih mengalami kesulitan karena tidak memiliki jaminan atau agunan. Kebanyakan usaha yang mereka miliki tidak memiliki ijin usaha atau belum terdaftar dan walaupun ada pengusaha yang meminjam modal ke bank diharuskan dengan jaminan sertifikat tanah yang mereka miliki. Sementara itu berdasarkan pengakuan dari ihwahyono , pengusaha cor kuning mengatakan bahwa :

” saya setiap hari biasanya memproduksi 3-5 unit perhari , dimana saya harus memiliki modal usaha sebesar Rp. 10 juta. Tetapi karena modal kami minim, sekitar 5 juta sehingga saya harus memenuhi permintaan sesuai dengan kemampuan produksi ”. (wawancara hari Kamis, tanggal 18 Maret 2008)

Selain itu pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Arifin, pengusaha dompet mengatakan :

” kadang saya kalau kekurangan modal untuk produksi saya juga harus pinjam pada keluarga terlebih dahulu. Karena untuk hidup saya bergantung pada usaha ini. Kekurangan modal terkadang saya alami ketika permintaan meningkat, kira-kira sebesar Rp. 8 juta -10 juta”. (wawancara hari Kamis, tanggal 18 Maret 2008).

Untuk menjalankan usaha faktor modal memang memegang peranan yang penting agar usahanya bisa berjalan lancar. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperoleh modal dengan mudah sangat diharapkan oleh para pengusaha kecil seperti industri kecil.

c. Sistem Manajemen yang kurang baik

Kualitas SDM merupakan faktor terpenting dalam melakukan pengembangan terhadap industri kecil. Untuk melakukan pengembangan diperlukan tenaga kerja baik kuantitas dan kualitas yang memadai. Selain SDM dari pengusaha sendiri cukup rendah sehingga dalam mengelola usahanya, merespon peluang-peluang pasar dan melakukan diversifikasi produk cukup kesulitan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Sugiyo pengusaha manik-manik, mengatakan bahwa :

” selama ini saya kesulitan untuk melakukan pengelolaan manajemen usaha juga diversifikasi produk, karena tenaga kerja yang saya miliki keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan, sehingga untuk manajemen usaha saya lakukan sendiri bersama keluarga ”. (wawancara hari rabu, tanggal 17 maret 2008)

Hal ini memang sulit untuk dilakukan perubahan karena sudah menjadi kebiasaan atau kultur masyarakat dalam menjalankan usahanya tidak pernah memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparlan selaku Kasubdin Koperasi mengatakan bahwa :

” yang terjadi di masyarakat adalah budaya para pengusahanya yang dikenal nrimo dan cepat puas diri dengan kondisi yang ada. Selama modal berputar sudah, sehingga kurang adanya keinginan untuk memperbaiki manajemen usahanya. Sebenarnya dari Disperindagkop sendiri sudah banyak melakukan pelatihan mengenai manajemen tetapi memang belum membuahkan hasil yang besar meski sudah beberapa pengusaha yang memperbaiki manajemen usahanya”.(wawancara hari kamis 18 maret 2008, pukul 08.00 WIB di kantor Disperindagkop Kabupaten Jombang).

Keseriusan masyarakat untuk mengelola manajemen usahanya dengan baik terlihat dari inovasi masyarakat untuk membuat usahanya menjadi lebih besar seperti dalam mengurus surat ijin usaha perdagangan juga mengelola keuangan yang dilakukan secara sederhana.

d. Lemahnya penguasaan teknologi

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Penguasaan teknologi yang minim menyebabkan akses terhadap informasi perkembangan usaha dan persaingan sangat terbatas sehingga yang terjadi pengusaha kecil gagap terhadap perubahan pasar yang sangat cepat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan oleh bapak Sugiyo, pengusaha manik-manik yang mengatakan bahwa :

” Saya ini mas hanya lulusan SD, saya gak tahu teknologi sehingga saya selalu ketinggalan informasi mengenai perkembangan usaha saya. Komputer saja saya gak bisa mas ”. (wawancara hari jum’at, 19 maret 2008)

B. Analisa dan Intrepretasi Data

1) Upaya Pemberdayaan Industri Kecil di Kabupaten Jombang

a) Bidang SDM

Serapan industri kecil yang tinggi terhadap tenaga kerja hanya sekedar terbatas pada sisi kuantitasnya. Oleh karena itu, mudah dibayangkan bagaimana kualitas SDM yang terlibat dalam proses produksi industri kecil. Kalaupun ada yang berkualitas, umumnya hanya dalam jumlah yang kecil, dan itu pun hanya berkaitan dengan faktor keahlian dan ketrampilan seperti dijumpai pada industri kerajinan rakyat. Sementara, untuk tenaga-tenaga lain berkaitan dengan manajemen dan administrasi tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai.

Keterbatasan kemampuan para pengusaha kecil dalam manajemen usaha merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sulit berkembangnya usaha yang mereka jalankan. Banyak kegiatan-kegiatan usaha yang kurang memiliki perencanaan yang matang, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal. Menurut penulis, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh sebagian besar pengusaaha kecil merupakan faktor lain yang mengakibatkan ruwetnya manajemen usaha. Kebanyakan dari mereka tidak melakukan

pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Hal ini menyebabkan modal usaha sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi ketimbang untuk mengembangkan usaha yang ada.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ahmad Erani Yustika (2003:115-116) bahwa UKM memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain kegiatan cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana, struktur organisasi bersifat sederhana, kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, dan sistem akuntansi kurang baik, bahkan tidak memiliki sama sekali.

Selanjutnya Tambunan (2002:78) juga menegaskan bahwa :

“ Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UKM di Indonesia, terutama aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran dan penelitian pasar. Sedangkan semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru “.

SDM yang dimiliki oleh pengusaha kecil di Kabupaten Jombang sendiri juga bisa dibilang rendah. Pendidikan formal yang mereka miliki hanya sebatas SLTA atau SLTP, dan bahkan banyak yang hanya lulusan SD. Latar belakang pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir mereka dalam menjalankan usaha. Contoh konkritnya adalah kacaunya sistem pembukuan/manajemen usaha. Dengan kenyataan yang seperti ini, para pengusaha kecil akan kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Sebenarnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang telah menyusun program pembinaan dalam aspek SDM dengan berbagai program kegiatan, meliputi :

- a. Pembentukan dan mengaktifkan kelompok kerja usaha kecil yang sejenis meliputi aspek-aspek SDM, pengadaan bahan baku, proses produksi dan pemasaran
- b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bidang manajerial dan teknis kegiatan usaha ekonomi produktif melalui pelatihan dan kursus-kursus

- c. Mengubah wawasan kewiraswastaan dari orientasi jangka pendek ke jangka panjang dalam ruang lingkup kelangsungan usaha dan kualitas produksi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif melalui pelatihan dan pembinaan yang kontinyu
- d. Memperluas cakrawala pengusaha kecil dalam mengelola usahanya melalui studi komparasi, magang kerja di berbagai tempat terkait dan relevan dengan usahanya
- e. Memperluas kesempatan pengusaha kecil dalam memperoleh pelatihan dan kursus-kursus manajemen usaha dan teknologi dalam usahanya
- f. Menyelenggarakan dan mengaktifkan lembaga pelayanan informasi dan konsultasi manajemen usaha kecil

Namun demikian, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas tidak dilakukan secara massal dan terprogram setiap tahun dengan alasan keterbatasan personil dan keahlian pembina dan keterbatasan dana. Pengusaha yang menginginkan pembinaan harus mengajukan dulu, kemudian disurvei oleh dinas untuk ditindak lanjuti apakah layak untuk diberikan pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Disperindagkop hanya sebatas rutinitas belaka, Disperindagkop tidak sungguh-sungguh memberdayakan dan mengatasi permasalahan usaha kecil di Jombang.

Menurut penulis, hal ini yang menjadikan pengusaha kecil enggan untuk meminta bantuan ke Dinas, seharusnya Dinas mempunyai inisiatif untuk membentuk kelompok-kelompok pada tiap sentra-sentra usaha, kemudian mengadakan pelatihan secara rutin.

b) Bidang Teknologi

Berbeda dengan negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama/ tradisional dalam bentuk mesin tua atau alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya kualitas produk yang dibuat. Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau

menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam proses produksi.

UKM pada umumnya masih menggunakan teknologi lama/tradisional yang sifatnya masih manual/semi manual, dalam proses produksi, biasanya hanya sekitar 25 %-40% saja yang dikerjakan oleh mesin, sisanya dengan tangan manusia.

Menurut Tambunan (2002 : 80), ada beberapa hal yang menyebabkan terbatasnya teknologi yang digunakan oleh UKM, yaitu :

“ Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi”.

Hal yang serupa juga dialami oleh para pengusaha kecil di Kabupaten Jombang. Dalam proses produksi, mereka masih menggunakan peralatan/mesin yang semi manual. Hanya ada beberapa saja yang sudah menggunakan peralatan modern. Keterbatasan dana yang dimiliki merupakan penyebab utama masih dipakainya peralatan tersebut. Mereka tidak mampu membeli peralatan/mesin baru yang lebih modern yang harganya telah membumbung tinggi, sehingga mereka masih tetap menggunakan peralatan warisan dari orang tua yang umurnya sudah belasan, bahkan puluhan tahun.

Keterbatasan teknologi yang digunakan oleh pengusaha kecil di Kabupaten Jombang menyebabkan produksi mereka kurang efektif dan efisien, sehingga jumlah produk yang dihasilkan serta kualitasnya tidak bisa maksimal.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tambunan (2002: 80):

“ UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya *total factor productivity* dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat”.

Melihat permasalahan diatas, Disperindagkop Kabupaten Jombang melakukan program sebagai berikut :

1. Pengadaan dan pelatihan (diklat) tentang penguasaan teknologi yang berbasis pada usaha kecil
2. Pengadaan bimbingan dan konsultasi teknologi terhadap usaha kecil secara terpadu
3. Pengadaan klinik teknologi dan manajemen usaha kecil

Menurut penulis, kegiatan yang dilakukan sangat terbatas hanya mengadakan pelatihan tentang penguasaan teknologi maupun konsultasi teknologi. Fakta dilapangan, pengusaha kecil sangat membutuhkan bantuan peralatan mesin untuk meningkatkan produksi mereka.

c) Bidang Permodalan

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi usaha baik skala kecil, menengah maupun besar. Pengusaha memerlukan tambahan modal dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan usahanya. Dengan tambahan modal, pengusaha kecil dapat meningkatkan inovasi dan kreativitasnya.

Sebagian besar para pelaku UKM masih mengeluhkan mengenai masalah permodalan yang mereka hadapi, baik dalam proses awal pendirian usaha maupun untuk menjalankan dan mengembangkan usaha tersebut. Padahal modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tambunan (2002: 74)

“ UKM, khususnya usaha kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial : mobilitas modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber - sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi, apalagi untuk investasi (perluasan kapasitas produksi atau mengganti mesin-mesin tua) “

Selama penelitian di lapangan , penulis menemukan suatu keadaan bahwa para pelaku industri kecil sebagian besar mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan modal dari perbankan, sehingga mereka kesulitan dalam

mengembangkan usahanya. Selain panjangnya prosedur yang harus dijalani dalam pengajuan kredit pada pihak bank, mereka juga merasa keberatan dengan tingginya suku bunga pinjaman yang harus dibayarkan.

Josephine Wuri Dalam Hg. Suseno T.W, Firma Sulistyowati dan Dionysius desembriarto (2005:46) menyatakan bahwa masalah eksternal yang dihadapi UKM saat ini adalah :

1. UKM tidak dapat memperluas usaha karena keterbatasan akses pada sumber permodalan karena semua bank, termasuk lembaga perkreditan yang khusus untuk UKM mensyaratkan adanya agunan
2. Adanya distorsi pasar, hak istimewa banyak diberikan pada perusahaan perusahaan besar, misalnya kemudahan kredit, lisensi bisnis keringanan pajak dan penciptaan regulasi yang kondusif
3. Adanya aturan-aturan yang kontradiktif dengan upaya pengembangan UKM, misalnya lahir perda-perda untuk peningkatan pajak dan retribusi daerah
4. Suku bunga masih relatif tinggi. Dengan masih tingginya suku bunga, UKM mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sumber pendanaan karena keuntungan yang diperoleh masih dibawah rata-rata.

Meskipun permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil sulit dipecahkan oleh mereka, menurut penulis, dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang kurang berperan untuk membantu mengatasinya. Hal ini terlihat dari kebijakan masalah permodalan yang dibuat, yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Jombang adalah memberikan rekomendasi bagi para pengrajin dalam mengajukan kredit kepada pihak bank

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis di lapangan, wewenang yang dimiliki oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang sangat lemah karena hanya sebatas memberikan rekomendasi pengrajin mana saja yang berhak / layak mendapatkan bantuan kredit. Sedangkan yang berhak menentukan siapa saja yang berhak menerima serta besar kecilnya kredit yang disalurkan adalah pihak bank sendiri, yang dalam hal ini adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kabupaten

Jombang. Kebijakan ini berlaku untuk pinjaman yang dananya berasal dari Kabupaten Jombang maupun pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Kecilnya kewenangan yang dimiliki, menurut pengamatan penulis membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang tidak dapat berbuat banyak dalam membantu mengatasi masalah permodalan yang dialami sebagian besar pengusaha kecil. Dari pihak bank sendiri biasanya menerapkan syarat yang ketat serta prosedur pengajuan pinjaman yang panjang dan berbelit-belit, yang membuat para pengusaha kecil merasa enggan untuk mengajukan kredit.

Selain hal-hal tersebut diatas, penulis juga menemukan hal lain yang melatarbelakangi keengganan para pengusaha kecil Kabupaten Jombang mengajukan kredit pada bank, yaitu :

1. Dalam mengajukan kredit, pihak bank mewajibkan adanya agunan/jaminan, yang senilai dengan jumlah kredit. Ketidakpastian usaha saat ini membuat para pengusaha kecil kurang berani mengambil resiko dalam pengajuan kredit pada bank. Mereka merasa takut nantinya tidak mampu membayar cicilan hutangnya.
2. Tingkat suku bunga bank yang harus dibayarkan. Tingkat suku bunga pinjaman perbankan yang cukup tinggi juga ditengarai menjadi salah satu penyebab para pengusaha kecil enggan untuk mempergunakan jasa perbankan tersebut. Para pengrajin merasa hal ini sangat memberatkan, mengingat usaha mereka akhir-akhir ini juga kurang lancar.

Dengan berbagai kendala permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil , serta kurangnya peran Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk kedepannya, para pengusaha kecil masih akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, mengingat modal merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia usaha, sedangkan pengusaha kecil sendiri sebagian besar lemah akan akses modal.

Selain itu , wilayah industri yang sebagian besar terletak di daerah pedesaan menyebabkan mereka kurang mendapatkan informasi tentang kredit usaha, seperti misalnya tentang kucuran dana pengembangan UKM dari

pemerintah, tentang jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh bank maupun manfaat yang didapat dari kredit tersebut.

d) Bidang Pemasaran

Dengan adanya persaingan yang semakin ketat, maka pengusaha kecil harus melakukan inovasi yang terus-menerus dalam hal produknya, namun demikian usaha ini tidak dapat begitu saja meninggalkan citranya sebagai kerajinan tradisional dan selama ini dengan..

Hg. Suseno dalam Reposisi usaha mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian Nasional mengungkapkan bahwa :

“ Permasalahan pemasaran merupakan kesulitan lain yang dihadapi oleh pengusaha UKM. Kesulitan pemasaran pada umumnya terjadi karena permintaan menurun, akibat dari situasi ekonomi yang memburuk, seperti lemahnya daya beli masyarakat. Sementara itu belum semua UKM siap berorientasi ke produk ekspor. Sebagai contoh, sejak krisis terjadi tahun 1997, daya beli masyarakat terus menurun, padahal sifat permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh UKM justru bersifat elastis terhadap perubahan harga. Artinya, kenaikan harga sedikit saja akan menurunkan permintaan cukup besar. Faktor lain adalah tidak mampu menjual pada harga pasar dan produk UKM yang tidak hanya mampu bersaing, baik dalam kualitas maupun pelayanan”.

Sepinya pasaran lokal menuntut para pengusaha kecil untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas. Meskipun begitu, usaha tersebut juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, dan salah satunya adalah semakin ketatnya persaingan usaha. Disisi lain pengusaha kecil kurang begitu mendapat akses informasi tentang keadaan pasar di pasaran nasional maupun internasional.

Data yang penulis peroleh di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang , khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi telah berusaha melakukan upaya-upaya pemberdayaan aspek pemasaran seperti :

1. Pelatihan bagi pengusaha kecil tentang *grading, branding dan packaging*
2. Pelatihan bagi pengusaha kecil bidang distribusi barang dan penjualan
3. Penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah
4. Pembentukan sistem informasi pasar antar wilayah sentra usaha kecil

5. Pengembangan jasa sarana transportasi dan distribusi
6. Pelatihan untuk pengusaha kecil tentang prosedur dan teknik impor

Meskipun pemerintah kabupaten jombang telah mengeluarkan beberapa kebijakan/program terkait masalah pemasaran yang dihadapi oleh pengusaha kecil, namun kegiatan konkrit yang sampai saat ini dilakukan masih sebatas membantu promosi, dengan cara mengikutsertakan mereka dalam pameran-pameran yang diadakan tiap 6 bulan sekali.

Penekanan program kegiatan pemberdayaan pada aspek promosi menurut penulis tidaklah salah mengingat permasalahan utama yang dihadapi oleh para pengusaha kecil adalah kurangnya akses informasi dengan luar sehingga mereka kesulitan untuk menemukan pangsa pasar baru karena pasar lokal semakin sepi. tetapi akan lebih baik jika kegiatan promosi tersebut diimbangi dengan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam program pemberdayaan aspek pemasaran. Belum maksimalnya kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam melakukan pemberdayaan juga tidak terlepas dari masalah minimnya dana yang dimiliki, serta belum tersedianya aparatur pemberdaya yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

e) Bidang Administrasi Usaha

Untuk bisa berkembang usaha kecil maka dibutuhkan suatu manajemen yang lebih profesional dengan mengedepankan aspek administrasi yang rapi dan teratur ini bisa dilakukan dengan jalan pembinaan atau pelatihan di bidang manajerial.

Adapun kegiatan pembinaan tersebut berupa pelatihan, pendidikan dan penyuluhan. Sedangkan kegiatan pembinaan industri kecil yang diarahkan pada aspek manajerial atau pengelolaan usaha dapat ditempuh melalui peningkatan potensi SDM melalui pendidikan, pelatihan, teknis manajemen ataupun pelatihan dasar serta kegiatan lainnya yang menunjang berkembangnya usaha kecil.

Tujuan diadakannya pendidikan dan latihan tersebut adalah untuk memperoleh tenaga terdidik dan terampil terutama bersifat *teknikal skill*

sehingga dengan adanya upaya ini dapat memperoleh produksi yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan permintaan pasar. Dan pembinaan tersebut dapat melalui penyuluhan yang bertujuan agar mampu mengatur manajemen usahanya yang bersifat manajerial skill disamping itu program tersebut industri kecil dapat lebih bersaing di pasar global.

Disperindagkop Kabupaten Jombang telah melakukan program, meliputi antara lain :

1. Pelatihan bagi pengusaha kecil tentang administrasi perusahaan terapan
2. Pelatihan tentang manajemen keuangan terapan bagi pengusaha kecil
3. Pelatihan untuk pengusaha kecil tentang pembuatan usulan pengembangan usaha

Sebetulnya program yang dilakukan oleh Dinas sudah cukup bagus dalam membantu memecahkan permasalahan pengusaha kecil, namun demikian Disperindagkop kurang sungguh-sungguh dalam melakukan pemberdayaan.

2) Respon Pengusaha Kecil terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang

Respon merupakan tanggapan, reaksi dan jawaban. Respon mengandung penjelasan bahwa tidak hanya sekedar suatu tanggapan atau reaksi tetapi juga disertai oleh adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap suatu hal atau objek.

Respon adalah hasil perilaku dari stimulasi yaitu aktivitas dari orang yang bersangkutan tanpa memandang apakah stimulus tersebut dapat diidentifikasi atau tidak dapat diamati. Respon akan terkait dengan stimulus sehingga jika stimulus terjadi maka suatu respon akan mengikuti (Ginson dalam Suhadi, 2000).

Data di lapangan menunjukkan bahwa respon pengusaha kecil kurang merespon terhadap pembinaan berupa pelatihan maupun diklat yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi karena menganggap kurang berpengaruh terhadap keberadaan usaha mereka. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan sebagian besar pengusaha kecil yang

rendah sehingga daya tangkap dan daya pikir dan akses informasi luar yang kurang.

Data penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kecil sangat berharap pada bantuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk mengembangkan usahanya. Adapun prioritas bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan modal, bantuan peralatan produksi dan pemasaran produknya.

3) Kendala dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang

1) Kendala Kedinasan

Dalam upaya pemberdayaan , pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Tambunan (2002 : 146) bahwa peranan pemerintah daerah dalam pemberdaayaan usaha kecil adalah sebagai berikut :

1. Implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM oleh pemerintah pusat
2. Formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUKM termasuk penyempurnaan administrasi daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan
3. Koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program dan aktivitas-aktivitas pengembangan KUKM yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta dan lembaga-lembaga masyarakat di daerah
4. Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan KUKM
5. Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat rekomendasi terhadap implelementasi dari langkah-langkah pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD

Untuk mewujudkan peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi maka SDM (aparatur pembina teknis) merupakan faktor yang sangat penting. Sumber daya pembina ini harus memenuhi persyaratan atau memiliki kualifikasi seperti yang dibutuhkan.

Sementara itu, data lain yang penulis peroleh dilapangan juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang belum benar-benar dapat

menjalankan tugasnya dalam memberdayakan usaha kecil. Kebijakan yang dibuat juga belum diimplementasikan secara tepat dan maksimal. Kebijakan yang ada selama ini disusun untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan UKM secara umum, padahal tiap-tiap usaha-usaha kecil mempunyai tingkat dan jenis permasalahan yang berbeda-beda. Meskipun untuk memecahkan masalah ini pemerintah telah menerapkan sistem perencanaan bottom up (sistem perencanaan yang dilandasi oleh kebutuhan dan manfaat) namun dalam implementasinya kurang maksimal.

Kendala lain yang dihadapi oleh dinas adalah mengenai keterbatasan dana yang ada untuk membiayai program pemberdayaan. Hal ini menyebabkan program pemberdayaan kurang maksimal karena kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan secara bergilir dan dikaukam tidak secara rutin.

2) Kendala dari Pengusaha Kecil

a. Kualitas SDM pengusaha yang lemah

Keterbatasan SDM pengusaha kecil disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga terbatas kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola usahanya. Dari hasil penelitian terhadap pengusaha kecil mengenai tingkat pendidikannya sebagian besar tingkat pendidikannya SD dan SLTP.

b. Permodalan

Hasil penelitian terhadap pengusaha kecil ternyata masih banyak pengusaha yang tidak berani meminjam modal usaha pada bank dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki jaminan atau anggunan. Selain itu mereka memilih untuk menggunakan modal sendiri guna menjalankan usahanya. Pihak Disperindagkop Kabupaten Jombang juga telah memberikan modal kepada pengusaha yang membutuhkan dan telah memiliki syarat yang telah ditentukan misalnya : memiliki ijin usaha industri, kemudian memberikan laporan perkembangan usahanya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang. Strategi untuk peningkatan kemampuan finansial pengusaha harus terus dilakukan agar usaha mereka tetap survive dan terus berkembang.

Pemerintah daerah bisa mengadakan penyertaan modal sementara tanpa adanya bunga yang mengikuti kepada pengusaha, maka hal ini sangat membantu berkembangnya usaha. Memang secara kasat mata pembinaan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang hanya berupa pinjaman dengan bunga yang mengikuiti tetapi belum mengarah kepada bantuan secara langsung kepada pengusaha.

c. Sistem Manajemen yang kurang baik

Hal penting yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen adalah permasalahan SDM yang tersedia. Kebanyakan pengusaha berlatar pendidikan yang masih rendah. Sehingga pengetahuan tentang manajemen usaha sangat kurang. Oleh karena itu perlu adanya konsentrasi kegiatan untuk perkembangan pengetahuan dan kompetensi dari para pengusaha tersebut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga dengan dukungan pihak swasta dan masyarakat setempat. Menurut Michael. E Porter dalam Tim Penerjemah Binarupa Aksara (1994, h. 11) dalam strategi keunggulan bersaing terdapat strategi yang penting untuk memperbaiki manajemen usaha salah satunya adalah strategi fokus yang bertujuan untuk memenangkan persaingan dengan pelayanan yang terbaik. Dimana yang menjadi perhatian dari strategi tersebut adalah industri memusatkan perhatian kepada kelompok pelanggan, pasar geografis dan segmen tertentu. Hal ini bisa diterapkan oleh pengusaha untuk melayani konsumen diberikan pelayanan yang terbaik dan lebih mengkhususkan kepada elopampin pelanggan yang sudah lama.

Selain itu perbaikan manajemen ini bisa dilakukan perbaikan dari SDMnya. Menurut Hetifah Sjaifudin (1995, h.66-67) strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil adalah pengembangan SDM. Untuk itu dilakukan dengan perbaikan formal, peningkatan keterkaitan dengan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui system pemagangan(link and match) serta pemberian insentif bagi pertumbuhan pusaat-pusaat penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SDM dan teknologi.

d. Lemahnya penguasaan teknologi

Penguasaan teknologi sangat diperlukan dalam mengelola maupun mengembangkan usaha. Penguasaan teknologi akan sangat membantu dalam

berjalannya usaha. Dari data di lapangan menggambarkan bahwa sebagian besar pengusaha kecil lemah dalam menguasai teknologi.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pemberdayaan Usaha Kecil di Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang yang dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi telah melakukan program meliputi :

1. Pemberdayaan dalam bidang SDM dengan melakukan program kegiatan diklat dan pelatihan manajemen produksi, manajemen keuangan, maupun dalam hal manajemen pemasarannya.
2. Pemberdayaan dalam Bidang Teknologi dengan melakukan program kegiatan Pengadaan dan pelatihan (diklat) tentang penguasaan teknologi yang berbasis pada usaha kecil, Pengadaan bimbingan dan konsultasi teknologi terhadap usaha kecil secara terpadu.
3. Pemberdayaan dalam Bidang Permodalan dengan melakukan program kegiatan pemberian informasi bantuan modal atau kredit dari lembaga-lembaga keuangan, baik itu bank maupun nonbank seperti koperasi . informasi bantuan ini juga meliputi pemberian konsultasi tentang pengajuan proposal.
4. Pemberdayaan dalam Bidang Pemasaran dengan melakukan program Pelatihan bagi pengusaha kecil tentang *grading, branding dan packaging Produc*, Pelatihan bagi pengusaha kecil bidang distribusi barang dan penjualan, Penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah, Pembentukan sistem informasi pasar antar wilayah sentra usaha kecil, Pengembangan jasa sarana transportasi dan distribusi dan Pelatihan untuk pengusaha kecil tentang prosedur dan teknik impor.
5. Pemberdayaan dalam Bidang Administrasi Usaha dengan melakukan program kegiatan Pelatihan bagi pengusaha kecil tentang administrasi perusahaan terapan, Pelatihan tentang manajemen keuangan terapan bagi pengusaha kecil dan Pelatihan untuk pengusaha kecil tentang pembuatan usulan pengembangan usaha

Adapun respon pengusaha kecil terhadap pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Disperindagkop kurang merespon yang menganggap bahwa

pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini kurang berpenharuh terhadap perkembangan usahanya, mereka lebih menginginkan bantuan yang lebih riil.

Adapun dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan terdapat kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi meliputi : Kualitas SDM pengusaha yang lemah, Permodalan, Sistem Manajemen yang kurang baik dan Lemahnya penguasaan teknologi.

B. Saran – Saran

Pemberdayaan Usaha kecil pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi usaha kecil, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.
2. Pola pembinaan sebaiknya dilembagakan artinya dibentuk kepengurusan misalnya dalam satu susunan organisasi sentra (KUB), dengan cara seperti itu program kerjanya dapat disusun dengan baik.
3. Mendirikan Pusat Informasi Sentra Usaha Kecil, keberadaan Pusat Informasi Sentra ini sangat penting dan strategis karena dengan demikian masyarakat baik dalam kota maupun dari luar kota dan wisatawan domestik maupun manca negara , jika ingin mencari informasi tentang keberadaan sentra cukup datang ditempat ini.
4. Melakukan survei terhadap usaha kecil untuk memetakan permasalahan usaha kecil.
5. Dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha kecil harus menyentuh permasalahan yang dihadapi usaha kecil,

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Sudantoko, Djoko.2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta : Rineka Cipta
- Milles, Mathew and Hubberman, A. Michael.1992. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Sumodiningrat, Gunawan.1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Suprpto, R.R.2002. *Jurnal-jurnal Ilmu Sosial : Strategi dan Model Pembinaan dan Pengembangan UKM kota Pasuruan*.
- Tambunan, Tulus T.H.2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa isu Penting*. Jakarta : Salemba Empat.
- Triuwono, Iwan dan Yustika Ahmad Erani.2003. *Emansipasi Nilai Lokal : Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*. Malang : Bayumedia Publisng.
- T.W.Hg. Suseno, Sulisyo, Firma dan Desembriarto, Dioysius.2005. *Reposisi Usaha Mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian Nasioanal*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Yustika, Ahmad Erani.2003. *Kaum Kaya vs Kaum Miskin*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M.Tohar.2002. *Membuka usaha kecil*. Yogyakarta. Kanisius
- Saleh Irsan Asyari.1989. *Industri Kecil sebuah tinjauan dan perbandingan*. Jakarta.LP3Es
- Tugiman, Hiro.1995. *Peranan Usaha Kecil dan Koperasi dalam Memanfaatkan sisa laba BUMN*. Bandung : PT.Eresco.
- Irianto, Jusuf.1996. *Industri kecil dalam prespektif pembinaan dan pengembangan*. Surabaya.airlangga University Press.
- M.Nazir.1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hanan, A. M. 2003. Sambutan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Makalah pada Seminar sehari “Alih Teknologi Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Agrobisnis”. Jakarta

Pratomo Titik, S. Dan Abdur Rachman S.2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sjaifudian, H. H, D. Maspiyati. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Penerbit Yayasan Akatiga, Bandung.

Moleong, Lexy J.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Pranarka AMW dan Prijono, Ommy S (ed).1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS

Sutojo dkk.1994. *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit perbankan di indonesia*. Jakarta :Publikasi LM-FE UI.

Syarif, S. 1991. *Industri dan Kesempatan Kerja*. Padang : Pusat Penelitian Universitas Andalas.

Porter, M.E.1995. *Strategi Bersaing : Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Pemerintah Kabupaten Jombang, 2002. *Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Usaha Kecil Kabupaten Jombang Tahun 2002-2007*.

Arsyad, Lincoln.2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BP. STIE-YKPN.

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang 1945.2006. ” UUD 1945 :”. Penerbit APOLLO. Surabaya

Website

Keputusan Menteri Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.2007. “ Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan jenis-jenis industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jendral dan kewenangan pemberian ijin bidang industri dan perdagangan “. Diakses pada tanggal 5 juli 2008 dari <http://w.depperin.go.id/regulasi/1999>.

